



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar
Hari, Tanggal : Rabu, 19 November 2014
Pukul : 10.00 WIB – 14.42 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Masukan terhadap:
1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence*).
2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence*)
- Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. (F-PKS)
2. Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
3. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

F-PDI PERJUANGAN:

-

F-PG:

-

F-GERINDRA:

4. H. Ahmad Muzani
5. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
6. Rachel Maryam Sayidina
7. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
8. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

F-PARTAI DEMOKRAT:

9. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
10. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
11. H. Darizal Basir
12. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.

F-PAN:

13. Budi Youyastry
14. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

F-PKB:

-

F-PKS:

15. Dr. H.M. Gamari Soetrisno
16. Dr. Sukamta

F-PPP:

-

F-NASDEM:

-

F-HANURA:

-

Anggota yang Izin

- :
1. Tantowi Yahya (F-PG)
 2. H. Firmandez, S.AK. (F-PG)
 3. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 4. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)
 5. Bambang Wiyogo, S.E. (F-PG)
 6. Ir. Fayakhun Andriadi, M. Kom. (F-PG)
 7. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E. (F-PG)
 8. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. (F-PG)
 9. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (F-Gerindra)
 10. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD)
 11. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
 12. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
 13. H. Ahmad Zainuddin, LC. (F-PKS)
 14. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (F-PPP)
 15. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Si. (F-PPP)
 16. H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (F-PPP)
 17. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. (F-PPP)

Undangan

: Kusnanto Anggoro

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MAYJEN TNI (PURN) ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P./F-GERINDRA):

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Terima kasih sekali Bapak Pimpinan Pak Asril Tanjung dan tentu saya harus mengucapkan terima kasih untuk bisa kembali berbincang dengan yang terhormat Anggota Dewan khususnya yang tergabung di dalam Komisi I DPR RI untuk membahas beberapa persoalan, tentu yang terkait dengan isu-isu sentral Komisi I DPR RI, yaitu pertahanan negara, kemudian dengan intelijen negara misalnya, lalu juga masalah-masalah politik luar negeri. Dalam undangan yang saya terima, kita akan membahas Rancangan Undang-Undang Ratifikasi mengenai Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan, dan Indonesia dengan Timor Leste. Tapi mungkin karena ini ada beberapa Anggota Komisi I DPR RI yang saya kira relatif baru dengan bidang-bidang pertahanan dan keamanan, dan juga politik luar negeri, barangkali saya akan membuka ruang yang lebih banyak tentu masih terkait dengan Pakistan dan Timor Leste yang terkait dengan perjanjian internasional.

Mengapa ini penting? Karena sekalipun tawaran untuk mendapatkan persetujuan ratifikasi itu baru dikirim kemarin, tetapi sesungguhnya Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Pakistan sendiri itu sudah ditandatangani Tahun 2001 oleh waktu itu Menteri Pertahanan, Pak Mahfud. Tahun 2001 menjadi penting, karena waktu itu katakanlah di Indonesia kita sedang mempersiapkan beberapa hal, termasuk Undang-Undang Pertahanan Negara yang pada akhirnya baru disepakati pada Tahun 2002, tentu juga termasuk dalam daftar itu ada Undang-Undang TNI Tahun 2004 dan apalagi Undang-Undang Intelijen yang baru disepakati pada Tahun 2001. Mengapa itu perlu saya tempatkan di dalam konteks ini? Karena ada beberapa elemen di dalam kesepakatan itu yang kemudian sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan ketentuan beberapa undang-undang yang ada, itu pun nanti akan saya katakan bahwa ketidaksesuaian pada konsep undang-undang itu tidak akan mengganggu kerja sama, tetapi ini latar belakang yang saya kira menjadi penting untuk dikemukakan, misalnya sejauh menyangkut konseptualisasi pertahanan negara Tahun 2001 sebelum menjadi Undang-Undang Tahun 2002, adalah Pak Asril Tanjung tentu paham betul bagaimana tentara berpikir tentang masalah-masalah keamanan nasional, tentang pertahanan nasional, tentang pertahanan negara, relasi yang begitu erat antara pertahanan negara dengan intelijen negara pada Tahun 2001, tetapi gambaran itu menyebabkan kenapa misalnya di dalam Persetujuan antara Menteri Pertahanan Muhammad Mahfud dengan Menteri Pertahanan Pakistan pada Tahun 2001 tentang Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Pakistan itu banyak hal tentu, selain hal-hal yang sangat umum, seperti dialog masalah-masalah strategis yang menjadi bersama kedua belah pihak, juga membicarakan masalah-masalah pertahanan negara, juga membahas tentang latihan kemiliteran, tapi juga tukar menukar informasi intelijen. Saya kira landasan pikir pada Tahun 2001 waktu itu adalah bahwa intelijen negara merupakan suatu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang amat dekat dengan TNI atau dengan pertahanan negara pada Tahun 2001. Tapi kita tahu bahwa belakangan ada reformasi, ada segala macam dan sebagainya, bahkan intelijen negara pada Tahun 2012 itu memiliki undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentu terkait dengan apa yang tadi kita bicarakan, Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Negara Indonesia - Pakistan, karena di sana di dalam salah satu klausulnya itu ada yang menyatakan tentang kerja sama intelijen, misalnya pertanyaan menjadi apakah dengan sendirinya ratifikasi atau pembukuan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia Pakistan menjadi sebuah Undang-Undang, dengan demikian juga membuka ruang kerja sama bagi intelijen negara, dalam hal ini BIN atukah RUU itu kalau dikukuhkan menjadi ratifikasi dan undang-undang hanya memberikan legitimasi bagi kerja sama militer atau kerja sama pertahanan negara. Nah, ini menjadi isu sentral yang perlu kita bicarakan, mengingat apa sih sebenarnya pentingnya Pakistan sekarang bagi Republik Indonesia. Tentu Pakistan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam banyak hal, kita bisa membicarakan

dalam konteks geopolitik di Asia Selatan, Pakistan adalah salah satu negara yang penting di kawasan itu, dan hubungan yang baik dengan Indonesia dengan Pakistan, dengan sendirinya juga memenuhi prinsip perimbangan, prinsip netralitas yang selalu dianut dalam politik luar negeri Indonesia, karena Indonesia selama ini sudah memiliki hubungan yang baik dengan India, sedangkan India dan Pakistan berada dalam situasi persaingan. Sehingga dengan demikian, maka meningkatkan hubungan dengan Pakistan juga akan memiliki sesuatu makna, bahwa Indonesia mencoba mempertahankan politik yang sangat tidak memihak kepada kedua belah pihak yang saling bersaing satu sama lain, tentu makna itu ada katakanlah dari segi politik Pakistan dulu juga merupakan kerabat karib Amerika Serikat dan belakangan kembali menjadi sahabat karib setelah beberapa tahun, terutama persoalan reformasi politik di Pakistan dan soal radikalisme Islam di Pakistan agak jauh hubungan antara Amerika Serikat dengan Pakistan. Dengan demikian, maka hubungan yang baik dengan Pakistan mungkin juga bisa bermanfaat untuk Indonesia, terutama dalam kaitan dengan alih teknologi persenjataan. Kita tahu bahwa dalam alih teknologi persenjataan ada beberapa restriksi, seperti ... teknologi kontrol rezim, dan sebagainya yang kita tidak bisa dapatkan langsung dari negara asalnya, yaitu katakanlah Amerika Serikat, tapi mungkin bisa kita dapatkan dari negara kedua, dalam hal ini Pakistan, karena teman dari Amerika Serikat barangkali bisa memainkan peranan penting di dalam konteks itu. Yang kita menjadi relevan membicarakan kerja sama dengan Pakistan karena di dalamnya juga disinggung tentang kemungkinan untuk pengembangan industri pertahanan yang beberapa hari silam saya kira kembali ditegaskan sebagai salah satu faktor penting di dalam program penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan negara oleh Menteri Pertahanan Pakistan. Tetapi satu hal yang saya kira sangat relevan dan ini tidak dipikirkan dalam Tahun 2001 adalah Pakistan menjadi sesuatu yang kira-kira memainkan peranan meskipun tidak langsung dan barangkali tidak dimaksud dalam konteks radikalisme Islam di banyak tempat termasuk di Indonesia perbatasan Pakistan dengan Afghanistan adalah ladang yang amat subur saya kira bagi pendidikan beberapa individu Warga Negara Indonesia yang pergi ke sana untuk berguru pada Taliban katakanlah, jadi ini saya kira akses yang tidak bisa kita dapatkan dalam beberapa bulan terakhir, waktu Duta Besar Pakistan masih, saya kira masih Pak Latuconsina ya beberapa bulan lalu kita pernah dihadapkan pada sejumlah soal, termasuk diantaranya bagaimana mendapatkan akses pada orang-orang Indonesia yang ada di sana. Lalu Kementerian Luar Negeri ternyata gagal untuk mendapatkan ... dari Pemerintah Pakistan, begitu juga intelijen negara BIN juga gagal, yang dapat membuka ruang itu adalah pak Latuconsina yang adalah TNI, mantan TNI sekurang-kurangnya, jadi tapi saya kira ini merupakan sesuatu yang tidak formal, nah apakah itu bisa diformalkan misalnya menjadi, nah ruang untuk formalisasi hubungan atau kerja sama intelijen antara Indonesia dan Pakistan, mungkin merupakan salah satu ruang yang bisa dibuka melalui ratifikasi ini, persoalannya adalah di Indonesia karena persoalan di Indonesia hubungan antara Panglima TNI dan Kepala BIN misalnya, tidak selamanya bagus, itu sangat tergantung kepada individu dan sebagainya dan sebagainya, status politik mereka sama-sama sebagai pembantu Presiden, setuju atau tidak setuju, saya sebenarnya yang termasuk tidak setuju, mereka tidak perlu untuk menempatkan posisi sebagai Kabinet dalam sebuah sidang Kabinet, tapi dalam praktek dan dua-duanya diperlukan. Tetapi ini sekali lagi relevansi jangka pendek untuk 1, 2 tahun ke depan dari segi informasi yang bisa kita gali dari Pakistan adalah terutama terkait dengan warga negara-warga negara Indonesia yang ada di Pakistan, terkait dengan katakanlah radikalisme Islam di Indonesia, ini penting, ini merupakan sebuah akses yang tidak bisa didapatkan secara langsung oleh BIN, tapi mungkin bisa dikatakan oleh Menteri Pertahanan melalui Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Pakistan itu. Nah, yang perlu di *follow up* saya kira kemudian dan mungkin bisa disarankan kepada Presiden adalah bagaimana kemudian menjalin kerja sama yang lebih baik antara Menteri Pertahanan dengan Kepala BIN, antara Panglima TNI dengan Kepala BIN. Karena ini tidak selalu bagus, masing-masing merasa memiliki undang-undang sendiri, Panglima TNI misalnya tentu saja berinduk pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, sedangkan BIN tentu berinduk pada Undang-Undang 17 Tahun 2012, Kepala BIN yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri *gitu*, tentu Pak Asril Tanjung tahu lebih baik dari saya tentang bagaimana hubungan antara Kepala BIN dan Panglima TNI atau dengan Menteri Pertahanan yang dalam 10 tahun terakhir tidak terlalu, sekarang kembali bagus tapi pernah tidak

bagus dan sebelum itu bagus pada masa Pak Syamsir Siregar dan sebagainya, tapi *point* saya adalah bahwa Ratifikasi terkait Persetujuan dengan Pakistan atau sebelum ratifikasi dulu, Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan pasti menguntungkan dalam konteks jangka pendek yang paling *urgent* bagi Indonesia adalah terkait dengan intelijen, cuma sayang sekali bahwa intelijen yang dimaksud itu bukan *combat* intelijen yang sebenarnya berada di dalam ranah pertahanan negara dan dilaksanakan oleh TNI, tapi lebih terkait dengan kontra intelijen atau intelijen nasional yang berada di ranah intelijen negara. Dengan demikian, mengukuhkan dalam bentuk sebuah undang-undang akan membawa kebutuhan lain, yaitu keharusan untuk meningkatkan integrasi fungsional antara katakanlah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Ini sesuatu yang memang tidak dipikirkan pada Tahun 2001 ketika kesepakatan Persetujuan Indonesia-Pakistan di bidang pertahanan itu disepakati kita tahu, sekali lagi ini persoalan yang tidak serumit atau tidak sekompleks dengan Pakistan, meskipun dari segi urgensi dugaan saya ratifikasi atau *multi playing effect* dari persetujuan yang kita miliki dengan Timor Timur itu akan lebih banyak, kita tahu bahwa kita mempunyai sejumlah persoalan dengan Timor Timur, kita tahu ada persoalan tentang misalnya adalah pengembalian aset Indonesia setelah ditinggalkan pasca referendum Tahun 1999, kita tahu kita memiliki persoalan yang belum selesai tentang 120 atau 125 ribu para pengungsi.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak Kus, mungkin baik kita selesaikan masalah Pakistan dulu. Nah, nanti kita beri juga kesempatan teman-teman biar nanti masalah Timor Timur setelah ini, jadi terima kasih Pak Kus, memang ada beberapa hal yang kita lihat Pakistan ini kan belum lama ini menjadi sorotan ya Operasi di Amerika sampai Osama Bin Laden dapat kemudian dengan Afganistan sebagian Pakistan juga masih ragu-ragu, abu-abu, ada yang ikut teroris ada yang nggak nah ini mungkin bahan ya, seperti tadi intelijen memang perlu, kemudian kita jangan lupa, Pakistan juga sebuah negara walaupun nggak sebesar kita ya, tapi dalam kemajuan teknologi kelihatan dia punya senjata nuklir dan yang lain apa maksudnya tadi itu untuk mengimbangi India mungkin ya cuma memang perlu juga ahli teknologi, memang mungkin perlu dengan Pakistan karena mohon maaf, kita sekolah-sekolah ini sering sama-sama Pakis berapa kali dan hampir setiap Angkatan kalau nggak salah angkatan Pak Salim, angkatannya kita sama Pak Darizal ini mereka orang asing selalu nomor satu Pakistan, jadi dia betul-betul sudah siapkan itu Siswa ini untuk ikut sekolah di Indonesia jadi Pak Kus ini ada yang baru, yang datang ini, yang depan ini, sebelah Pak Salim ini, ini Pak Darizal Basir ya, yang di belakang Pak Elnino angin ribut, tapi dia nggak pernah ribut, jadi Pak Darizal, Pak Elnino, ini Pak Kusnanto seorang Pakar kita memang kelihatannya sama ini, letingnya 73 sama saya, cuma 73 nya beliau masuk, kita keluar, ini agak terbalik dikit ya jadi nggak apa-apa Pak Kusnanto kalau memang Dengar Pendapat kita ini belum mencari kesimpulan, kita mencari masukan bahan-bahan untuk argumen kita untuk ratifikasi RUU ini nanti mungkin silahkan kalau memang ada Pak Alimin, *monggo* Pak Alimin

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Pak Ketua Komisi I yang saya hormati,

Pak Kus ini ternyata teman saya ini Pak. Jadi saya agak positif berani kira-kira ada guru nanti ini kalau saya masalah, ini hal yang baru Pak buat saya, tapi yang saya ingin tanya pagi ini Pak, mohon maaf ini kan apa? Semacam 2010 Pak ya dan 21 Juli 2010 kalau sekarang 2014 sudah hampir berakhir kan sudah 4 tahunan. Nah, kalau saya dengar dari Pak Kus ini, mestinya lebih banyak positifnya dan saya belum dengar....kenapa kita, inikan saya bukan Komisi I agak lama sesuatu yang positif buat negara kita *gitu* apalagi dihubungkan dengan peralatan Alutsista kita yang dari Amerika, sulit mendapat apa suku cadang dan sebagainya *gitu* Pak ya agak kurang mengerti apa yang menyebabkan kita atau tentu ada halangan kenapa kita agak memperlambat meratifikasi atau membuat Undang-Undang kira-kira menurut Pak Kus ya karena ini kan tertutup ini Pak ya. Kita ingin tahu Pak, supaya kita bisa saja, kalau misalnya masih ada relakan antara Menteri Pertahanan dengan BIN, kan ini sama-sama Mitra kami ini Pak. Nah, yang pengetahuan saya, dia positif buat bangsa kita, iya kan Pak. Mustinya kita harus bisa menyelesaikan di dalam, tapi kenapa 4 tahun yang lalu itu apa memang tidak pernah dibahas,

saya kurang tahu teman-teman di Komisi I yang lama atau memang betul-betul ada sesuatu yang relaktn lah untuk kita lanjutkan kepada Undang-Undang. Kalau bisa Bapak berikan ini supaya kita bisa ingin, karena kalau *nggak* salah target kami Pak, paling tidak yang Pakistan kalau bisa katanya kan *gitu* Pak dipercepat, ini bukan hasil Komisi I ya kalau nanti ada informasidengan Pak Kus agar kita bisa hal-hal yang menjadi keberatan untuk kita selesaikan mudah-mudahan *nggak* ada halangan kita menyelesaikan.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya yang sudah daftar ini, Pak Salim Mengga.
Ditampung saja semua Pak Kus, Pak Salim Mengga, silahkan

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA):

Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan.

Yang ingin saya tanyakan sebenarnya mungkin bisa dijelaskan dari aspek geopolitik peran negara-negara di Asia Selatan ini ke depan karena kekuatan militer mereka itu *nggak* bisa di, dianggap enteng, karena India sekarang juga sudah membangun kapal induk dan negara yang memiliki kapal induk itu umumnya itu berencana untuk melakukan operasi pada wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, kita minta mungkin bagaimana sebenarnya peran mereka di Samudra Hindia, karena berbatasan dengan negara kita di bagian Selatan kemudian yang kedua dari aspek kerja sama di bidang teknologi setahu saya negara-negara yang menggunakan teknologi Amerika itu sebelum mereka kerja sama itu ada perjanjian Pak bahwa semua teknologi yang digunakan oleh negara-negara yang berasal dari Amerika, itu kalau mau kerja sama dengan negara lain maka dia harus ijin ke Amerika. Saya ambil contoh pesawat F16 yang dimiliki Belanda, yang harganya jauh lebih murah dan Blok 52, itu tidak bisa kita beli, terpaksa kita harus ambil hibah dari Amerika, karena Amerika tidak beri ijin kepada Belanda. Jadi hampir seluruh negara-negara yang menggunakan teknologi Amerika Pak. Itu masalah-masalah kerjasamanya terutama di bidang industri pertahanan itu terhambat karena kebijakan Amerika sendiri Pak. Kemudian yang kedua, tentang intelijen kita Pak. BIN sebenarnya adalah merupakan koordinator dari intelijen yang ada di lingkungan TNI Pak, ada BAIS (Badan Intelijen Strategis) dan umumnya Atase-Atase Pertahanan kita itu ditempatkan di negara-negara sahabat, itu sudah mendapat pendidikan intelijen strategis. Ini sebenarnya merupakan jembatan buat kita dalam kerja sama di bidang intelijen. Hanya seberapa jauh kemampuan kita untuk melakukan kerja sama dengan Badan Intelijen Negara itu, itu mungkin yang menjadi persoalan buat kita.

Saya kira itu dulu Pak yang bisa saya berikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Salim, jadi mungkin sudah bisa ditampung.
Lanjutnya Pak Sukamta. Silakan Pak Kamta.

F-PKS (Dr. H. SUKAMTA):

Terima kasih Pak

Pak Kus, ini bagi saya pertahanan ini wilayah baru ini ya, sehingga mungkin bagi saya ini juga pembelajaran. Oleh karena itu, mungkin saya ingin mendapatkan pencerahan ya. Yang pertama, terkait dengan tadi yang geopolitik dan geostrategi Pakistan, karena Pakistan ini kan dia menjadi penghubung di Asia Tengah, tapi juga punya perbatasan dengan Cina dan juga punya apa namanya, potensi masalah rebutan air dengan Cina. Dia juga punya perbatasan dengan India dan punya sejarah konflik. Ke barat nanti juga menjadi pintu ke daerah Timur Tengah kalau di sektor perdagangan. Pakistan ini strategis untuk membuka pintu perdagangan di Asia Tengah, terutama untuk pemasaran komoditas yang agak terhambat di Eropa, salah satunya misalnya sawit ya. Itu Pakistan memang bisa menjadi pelabuhan antara *gitu* untuk pemasaran sawit di kawasan Asia. Nah, saya yakin dari urusan pertahanan ini juga tidak kalah pentingnya dari sektor perdagangan (*suara tidak jelas*) mungkin sebagai orang baru saya perlu mendapat pencerahan kalau kita membuka hubungan diplomatik dengan Pakistan itu. Selain keuntungan langsung dalam konteks tadi ya, islam radikal teknologi militer. Nah, dalam konteks

geopolitik, geostrategic, kita di Asia terutama ya, Asia Tengah, Asia, China, India, ini karena bagaimanapun juga peran Indonesia yang bebas aktif ini mengharuskan kita tidak hanya punya poros tunggal walaupun ada ada satu dorongan kuat untuk memperkuat hubungan dengan Cina dan India, tetapi saya kira akan kita tidak tunggal seperti di masa lalu yang, poros Beijing, China, eh Beijing Jakarta *eh sorry* Peking-Jakarta ya dulu ya. Nah, kita ingin mungkin menjadi multipolar *gitu* ya. Nah sementara juga persoalan Asia Tengah ini kan persoalan, ada persoalan yang agak lebih kompleks di situ dia selain Afganistan ada negara-negara Islam yang dulunya dibawa Uni Soviet yang sudah Merdeka mereka juga punya potensi ekonomi yang luar biasa, mereka punya tambang-tambang mineral, termasuk minyak yang juga luar biasa. Nah, termasuk wilayah Cina bagian Barat yang mayoritas juga muslim yang sedang punya ketegangan dengan pemerintah pusatnya itu juga wilayah yang kaya juga *gitu*. Nah, apakah dengan kita punya hubungan dengan Pakistan itu membuat pintu-pintu ini menjadi lebih terbuka atau kita perlu justru masuk ke jantung Asia Tengah lebih *direct gitu*, tidak melalui Pakistan.

Saya kira sementara itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kusnanto, mungkin sesi pertama 3 ini Pak Kus.

Pertama, memang dari Pak Alimin tadi kenapa kok lama *banget*, karena 2010 sudah kita mulai ini itu intinya yang kedua dari Pak Salim Mengga, memang Pakistan ini unik ini ya, dia punya mungkin dipaksa dengan situasi dia punya kekuatan militer yang cukup besar, dia juga punya kekuatan nuklir. Ini kemudian situasi di kiri kanan juga sangat ramai dengan masalah, terutama masalah keamanan. Kemudian terakhir dari Pak Sukamta tadi masalah keterbukaan Pakistan. Kepentingan kita juga mungkin *monggo* untuk sesi pertama ini silahkan Pak Kus mungkin bisa memberi informasi kepada kita.

Silahkan Pak.

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Terima kasih, semampu saya.

Bukan 2010, 2001 Pak Alimin persetujuannya, persetujuannya ya, Persetujuan Kerja Sama Indonesia-Pakistan itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Mohamad Mahfud pada Tahun 2000, jadi bukan 2010, jadi memang lama, tetapi begini bahwa itu lama dan baru kemudian sekarang kita bicarakan dalam konteks ratifikasi atau akan dikukuhkan menjadi Undang-Undang. Itu sesungguhnya kan menimbulkan pertanyaan lain juga, ternyata tidak diratifikasi atau tidak dikukuhkan menjadi Undang-Undang juga bisa jalan kerja sama antara Indonesia dan Pakistan, seperti Pak Asril katakan tadi, hingga tingkat tertentu selalu ada Perwira Siswa di Sesko TNI, di Sesko AD, di Sesko AL, dan Sesko AU itu dari Pakistan, India, China, dan seterusnya. Sekarang ada satu orang dari Pakistan misalnya, Angkatan 51 di Sesko TNI, Angkatan 52 di di Sesko AD Bandung itu ada satu orang dari Pakistan, jadi sekali lagi, lama itu di lain pihak justru menimbulkan persoalan. Kalau begitu tanpa dikukuhkan menjadi sebuah Undang-undang, tanpa disetujui menjadi ratifikasi, kerja sama itu sebenarnya juga bisa berjalan, tapi ini saya kira persoalan lain kan *gitu* ya. Saya kira ada satu soal yang memang penting Pak Alimin ya, khususnya dalam 10 tahun atau 15 tahun terakhir. Pakistan bukanlah sebuah negara yang relatif stabil dari segi misalnya adalah setelah penembakan Benazir Bruto waktu itu, pertumbuhan demokrasi dan sebagainya di Pakistan tidak terlalu bagus, posisi dominan masih dikuasai oleh kalangan intelijen Pakistan dan sebagainya dan sebagainya sehingga hubungan antara Pakistan tetap jauh dengan Amerika. Saya kira ini komplikasi yang luar biasa, situasi politik domestik di Pakistan bukanlah situasi yang kondusif bagi Pakistan untuk bisa melaksanakan politik luar negeri dengan baik, pemerintahan Nawa Syarif di Pakistan tidak cukup mampu untuk menjaga stabilitas kawasan Pakistan sebelah Timur Laut, yang waktu itu mempunyai katakanlah apa, persoalan dengan daerah-daerah sekitar, terutama adalah Kandahar yang dikuasai oleh kaum Taliban di Afganistan, tapi pada prinsipnya dalam bahasa yang lebih sederhana Pak Alimin, situasi politik domestik di Pakistan tidak memberikan *image* positif bagi siapapun juga, saya kira termasuk bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan lebih intens. Mungkin itu merupakan salah satu faktor mengapa kita juga tidak ada greget untuk katakanlah mengangkat kerja sama itu menjadi status legal yang lebih tinggi, diangkat menjadi

ratifikasi dalam bentuk Undang-undang. Yang kedua, tentu faktor Amerika Serikat karena setelah tertembaknya Benazir Bruto, situasi domestik di Pakistan, penguasaan oleh pemerintahan militer pada waktu itu menyebabkan Pakistan mempunyai hubungan yang jauh dengan Amerika Serikat, mau tidak mau, diakui atau tidak sekalipun kita selalu mengatakan kita bebas aktif dan sebagainya, tapi faktor Amerika Serikat itu selalu penting dalam konteks hubungan Indonesia dengan siapapun juga, termasuk dengan Pakistan. Jadi ini saya kira juga menjadi faktor kenapa kita agak lebih relakan ya atau paling tidak, tidak terlalu antusias untuk mengangkat kerja sama dengan Pakistan itu pada tingkat status legal yang yang lebih tinggi dari sekedar persetujuan antar Menteri menjadi katakanlah antar pemerintahan yang kemudian diratifikasi menjadi pada tataran undang-undang. Pertimbangan-pertimbangan itu bisa saja subjektif, tapi kita tidak bisa menambahkan kalkulasi yang objektif, antara lain tadi yang disinggung Pak Salim Mengga misalnya mengatakan dari segi kerja sama teknologi. Betul saya kira, Pakistan mempunyai potensi yang sangat besar kekuatan militernya. Saya kira bisa dikatakan 60% nya kekuatan India, Pakistan berada di rangking 21 menurut *Global Fire Power*, India ada di rangking 6, Indonesia ada di rangking 15 ya. Jadi kekuatan tangguh saya kira yang harus diperhitungkan dari segi itu, tapi bisakah kita berharap kerja sama dengan Pakistan dalam konteks misalnya peningkatan industri pertahanan, kemudian industri nuklir misalnya. Terus terang saya agak pesimis karena beberapa, seperti tadi dikatakan oleh Pak Salim Mengga, selalu ada restriksi dari negara utama, selalu ada *third ... agreement*. Tidak terlalu mudah bagi kita untuk mendapatkan sesuatu *transfer of technology* dari Pakistan. Kebetulan kita memang mendapat F16, sebagian di antaranya dari yang waktu itu tidak jadi dijual oleh Amerika Serikat ke Pakistan, karena situasi Pakistan yang tidak bagus di mata Amerika Serikat pada Tahun 2004 sampai Tahun 2010. Jadi *transfer of technology* itu *nggak* begitu. Untuk saya tidak begitu menjanjikan, paling tidak begini, dalam waktu saya kira yang akan terjadi 18 bulan ke depan, kalau kita lihat program-program.... yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. India justru memberikan janji yang lebih besar kita lebih intens bekerjasama dengan India, kita sudah melihat apa kemampuan yang dimiliki oleh Bramos misalnya dan saya kira setelah *Indian Policy Look East* dan sebagai salah satu *counter way* terhadap China di Samudra Hindia maupun di *South East* di Asia Tenggara, maka India saya kira mempunyai bobot politik yang lebih besar di banding Pakistan di mata Indonesia dalam 18 tahun ke depan. Kalau kita lihat dari program-program yang ada dalam Kementerian Pertahanan, dalam konteks itu dugaan saya, Pakistan memang tidak cukup memiliki atau tidak cukup diekslore sebagai salah satu sumber bagi katakanlah teknologi, tapi Pak Salim Mengga betul sekali, kekuatan militer bisa diandalkan cukup kuat dan sebagainya, dan sebagainya, tapi sekali lagi politik domestiknya juga *on and off* dan ini saya kira menimbulkan komplikasi domestik di Pakistan, khususnya hubungan antara Prime Minister, Perdana Menteri, Kepala atau Panglima TNP (Tentara Nasional Pakistan), terutama adalah Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan dan dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, ini yang agak rumit di Pakistan sehingga *policy making process* mengenai banyak hal, termasuk mengenai *transfer of technology* itu kira-kira tidak cukup menurut saya tidak cukup menjanjikan atau saya bisa mengatakan sebenarnya Turki menjadi opsi yang lebih baik. India menjadi opsi yang jauh lebih utama. Kalau saya harus menjatuhkan pilihan antara misalnya adalah Pakistan, India, Turki, dan yang lain-lain katakanlah, Pakistan mungkin masuk dalam kategori *list* yang ke 4 dan bukan yang ke 3, 2, 1, tapi tentu saja kalau sekedar mempunyai hubungan baik lalu berharap itu menjadi salah satu pilihan sih boleh-boleh saja, itu tidak mengurangi status *legal* dari sebuah Undang-Undang dari ratifikasi, tapi kalau kita berbicara tentang apa namanya, efektivitas atau efisiensi, saya tidak melihat peningkatan kemampuan hubungan pertahanan Indonesia-Pakistan itu bisa ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir kita tahu dengan Pakistan kita sudah memiliki beberapa hal misalnya adalah sering ketemu 2 tahun sekali, dialog masalah-masalah strategis, kerja sama militer juga dilakukan misalnya pengiriman timbal balik antara Perwira-Perwira Indonesia ke Pakistan dan Pakistan ke Indonesia, lalu kunjungan dari Kepala Staf Militer Pakistan ke Indonesia ke Lemhannas dan seterusnya. Itu reguler juga selalu terjadi. Jadi artinya adalah mengharap lebih dari itu kelihatannya sulit dan itu bisa dilakukan tanpa ratifikasi Undang-Undang berdasarkan pada kesepakatan pada Tahun 2001 bisa. Sekali lagi ini tidak ada hubungannya menolak ratifikasi, silahkan saja, itu status legalnya lebih baik kan boleh-boleh saja, tapi bahwa tanpa itupun sebenarnya *everything is gowell*,

atau *relativity well* kan *gitu*, dan kita tidak bisa berharap itu lebih dari itu kelihatannya dalam lima tahun ke depan. Lalu tentang geopolitik, yang saya kira ini sebagian diantaranya untuk Anggota Komisi I Pak Salim Mengga dan Kamto ya tadi, saya kira ke depan penting. Satu hal yang kita perlu bicara dan saya tidak yakin kalau Menteri Pertahanan atau Panglima TNI cukup memahami tentang bagaimana *rivalry* atau persaingan di laut India dan Indonesia juga baru tahun-tahun akhir ini saja mempunyai perhatian yang cukup besar terutama Kementerian Luar Negeri mengenai Samudra Hindia. Tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua IORA, yaitu *International Cooperation* tentang lautan, Samudra Hindia, tetapi banyak yang tidak kita pahami tentang itu. Kita tidak terlalu sadar, misalnya kalau Samudera Hindia sudah dikapling-kapling jadi bahkan China sudah mempunyai beberapa wilayah di sana selama ratusan kilometer persegi, mereka mendapatkan itu secara sah dari *International Sea Bed Authority* yang pernah diketuai antara lain oleh Profesor Hasyim Munzal punya sama sekali perhatian tentang Samudera Hindia. Jadi betul sekali saya kira India dan Pakistan dalam konteks ini *next rivalry*, antara mereka berdua saya kira adalah di Samudera Hindia. Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun belakangan mereka sudah tergabung di dalam... (*South Asian Association Regional Cooperation*) yang merupakan kompetisi antara India dan Pakistan dan kemudian itu menjadi ladang dominasi antara mereka berdua saja dan kalau di masa lalu Pakistan semacam merupakan ... saniter atau ... zone bagi India untuk bisa ke Barat, maka ini masih akan menjadi terus-terus berlangsung di kelak kemudian hari, tapi dugaan saya yang baru dan itu bisa dipastikan akan terjadi adalah persaingan antara India Pakistan di Samudera India. Nah lalu bagaimana dalam konteks itu Indonesia bisa katakanlah meningkatkan atau mencoba untuk memanfaatkan hubungan baik antara Indonesia dengan Pakistan maupun hubungan Indonesia dengan India dalam konteks misalnya adalah kerja sama di Samudera India. Saya kira itu menjadi sangat relevan Pak Salim Mengga ya. Kita tahu, kita belum punya *interest* cukup banyak di Samudra India dan tahun depan kita akan menjadi Ketua dan sayang sekali bahwa Kementerian Luar Negeri sering sekali tidak tahu cukup persis tentang apa yang akan dibicarakan di dalam konteks itu. Kalau seandainya Indonesia meningkatkan hubungan dengan Pakistan, ada unsur positifnya, karena selama ini kita sudah memiliki hubungan yang baik dalam Kerja Sama Pertahanan dengan India dan *template* Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan India itu sama persis dengan Indonesia dengan Pakistan. Bab-babnya itu mengenai bidang apa, terus kemudian sampai bidang yang terakhir itu bagaimana pengakhiran perundang-undangan di atas itu terkait dengan intelektual ... *right*, di atas itu terkait dengan segala macamnya, India dan Pakistan sama. Dalam konteks itu, barangkali cermin itu Pak kamto, bahwa kita berusaha untuk menjaga supaya tetap memiliki orientasi politik luar negeri yang berimbang, tidak hanya bersahabat dengan India, tapi juga berteman dengan Pakistan. Dengan India kita mengukuhkan kerja sama itu dalam konteks Undang-undang misalnya, maka ada baiknya dengan Pakistan juga itu, tapi ini sekali lagi mempunyai makna dugaan saya tidak lebih dari makna simbol diplomasi. Kalau kita berharap untuk mendapatkan sesuatu yang konkrit agak sulit, teknologi seperti tadi konkrit *is simple* kalau mau lebih konkrit lagi dan lebih jujur lagi yang paling murah untuk industri pertahanan sampai Tahun 2019 itu membeli, bukan membuat jadi kalau perhitungan ekonomi menjadi perhitungan dominan dan bukan keinginan untuk mandiri, untuk hitungan jangka panjang, paling simpel beli senjata karena paling murah. Kerja sama pasti mahal, pasti rumit, pasti ditolak orang lain kan *gitu* kira-kira ya, ini kalau konkrit-konkritan Pak, kalau konkrit, tapi kalau simbol itu soal lain, karena kita tidak bisa memberikan nilai terhadap simbol seberapa besar nilai dianggap sebagai, ini kan sulit sekali untuk mengevaluasinya sama dengan perdagangan Pak Kamto, karena perdagangan dimata saya bukanlah sesuatu yang bersifat ideologis tetapi *purely on economic basis*. Sekalipun banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa afiliasi ideologi dan sebagainya memerankan permainan penting dalam perdagangan, tapi dalam konkrit kalau anda punya uang anda bisa beli dan sebagainya. Dengan Pakistan agak sulit karena peningkatan macam-macam. Pakistan sendiri di mata Eropa tadi diharapkan supaya misalnya Sawit, Pakistan bisa menjadi *entry point*, lagi-lagi saya akan menjadi pesimis karena *image* negara-negara Eropa tentang Pakistan merosot di dalam 15 eh dalam 5 tahun belakangan ini. Sulit sekali untuk bisa mendapatkan, katakanlah Pakistan sebagai *stepping stone* untuk bisa memasukkan sawit untuk Asia Tengah. Persoalan *strategy* ...saya lebih suka *directed* ke misalnya ke Khazakstan, ke Usbekistan, ke Kirkistan, Tajkistan, dan sebagainya itu. Di Pakistan paling jauh yang bisa kita

harapkan, karena begini Pak Kamto, Pakistan di satu sisi memang betul strategis dari segi militer, dan kalau orientasi politiknya adalah dalam konteks nanti dikelak di kemudian hari adalah Samudera Hindia, tapi kalau dalam konteks politik Asia Tengah dan Middle East, saya justru melihat bahwa Pakistan adalah sebuah negara yang terkungkung di sebelah Baratnya ada Irak sebuah negara yang bagi Pakistan mau tidak mau diakui sebagai sebuah negara besar Parsi bukan Arab Pakistan bukan Arab, tapi dari segi keislaman saya Persia atau Iran itu masih lebih diterima oleh negara-negara *Middle East* atau Timur Tengah dibanding oleh Pakistan. Dengan demikian, kecil kemungkinan untuk bisa membayangkan katakanlah Pakistan bisa menjadi katakanlah jalan yang lebih baik bagi Indonesia untuk ke negara-negara Timur Tengah, Pakistan sendiri akan cenderung lebih *content* ya, terbatas oleh Persia, Iran maksud saya untuk mempunyai pengaruh yang lebih besar di negara-negara Timur Tengah. Di sebelah Barat kita tahu, eh sebelah Timur, kita tahu bahwa Pakistan berhadapan dengan India dan seterusnya, dan China dan seterusnya, sehingga sulit saya kira untuk membayangkan Pakistan bisa katakanlah bisa mengembangkan pengaruhnya ke Barat. Ke sebelah Utara agak susah juga, karena kawasan disebelah Utara Pakistan bukanlah kawasan yang relatif stabil. Pakistan Timur Laut misalnya adalah sebuah kawasan yang sejak Tahun 1989 itu selalu kacau balau setelah Najjullah di Afganistan jatuh digantikan oleh Pemerintah Burhanudin Rabani dan seterusnya dan seterusnya, sampai munculnya Taliban dan sebagainya, Pakistan sebelah Utara selalu kacau balau, akhirnya adalah bahwa Pakistan baik dari wilayah Barat terkungkung oleh katakanlah Iran maupun sebelah Timur oleh India dan sebelah Utara instability di Afganistan dan beberapa negara pecahan Uni Soviet seperti Kirgistan dan Tajikistan bukanlah sesuatu yang menjanjikan untuk itu. Nah dalam konteks ekonomi, dengan demikian maka potensi untuk meningkatkan itu akan sangat tergantung pada 2 hal saja. Satu adalah tergantung pada daya serap nasional Pakistan, *which is* dugaan saya terbatas, karena itu terbatas pada GDP dan seterusnya dan yang kedua tergantung pada apakah kita bisa menemukan komoditi baru yang non komplementer dengan komoditi yang ditemukan, yang dimiliki oleh Pakistan atau negara-negara lain, tapi apapun jawabannya, dua-duanya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan katakanlah Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Pakistan. Jadi bisa diupayakan secara mandiri, tentu saja dari segi ekonomi kita harus meningkatkan hubungan dan seterusnya dan seterusnya, tapi saya agak pesimis pak Kamto, kalau pertanyaannya adalah apakah dengan memiliki atau meratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Pakistan, kita bisa meningkatkan hubungan non pertahanan, ekonomi dan yang lain-lain dengan Pakistan, jawaban saya tidak jawaban saya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kus.

Sebelum kita lanjutkan sesi kedua memang kita ada melihat selama ini dan informasi bahwa Juni 2014 kemarin kita sudah meratifikasi Undang-Undang dengan India. Jadi Undang-Undang tentang Perjanjian Ekstradisi antaradengan India apakah ini juga menjadi pertimbangan kita untuk ratifikasi rencana Undang-Undang dengan Pakistan ini, karena kita memang tahu Pakistan negeri yang cukup banyak masalah selama ini, terutama di bidang keamanan, tapi ada satu yang poin lagi yang nah ini di kita lihat dari muslim ya nah ini ada semacam saya dapat informasi konteks muslim *brother* Indonesia dengan Pakistan ini cukup besar. Jadi ini juga bisa pertimbangan pertahanan. Di samping kita juga memikirkan India karena juga dia terpaksa menjadi negara kuat...mengimbangi India, tapi juga secara muslim itu adadengan Indonesia ya ini juga mungkin jadi pertimbangan kita ya apakah ini juga kita masukan dalam pertimbangan untuk meratifikasi, kita mohon nanti dari Pak Kus, tapi sebelumnya ini ada Anggota yang baru kita dating, Pak Gamari ya, ini beliau baru datang, maklum Jakarta macet. Jadi baru datang Pak, jadi, silahkan Pak Kus ini *gimana* untuk ini habisnya kita buka sesi kedua untuk Pakistan, mudah-mudahan selesai nanti, silahkan Pak.

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Iya, kalau saya juga pertimbangannya malah justru itu Pak. Justru itu. Jadi apa ya setelah menggeluti masalah diplomasi lama, itu akhirnya kita memang makna-makna simbolis dan aksidental itu lebih penting dari pada makna-makna rasional simbolik itu artinya seperti tadi

diplomasi dan seterusnya untuk menjaga keseimbangan antara Indonesia Pakistan dengan Indonesia dan India dan seterusnya itu menjadi lebih penting, sudah dengan India kok Pakistan belum dan seterusnya itu, tapi sekali lagi ini adalah makna-makna simbolik apa, makna aksidental terkait terutama dalam konteks Pakistan adalah misalnya bagaimana kita mencoba untuk memonitor Warga Negara Indonesia yang lalu lalang dari Indonesia ke Pakistan, menjadi murid para Taliban dan sebagainya dan sebagainya itu. Saya kira menjadi persoalan yang sangat krusial di Indonesia, mengingat ya situasi sosial-politik di Indonesia lah. Saya kira yang kita harapkan pada suatu saat kan, agak ironik bagi Indonesia bahwa dari segi diplomasi diakui sebagai moderat muslim di sana, tapi di sisi lain kita tidak cukup bisa menangani beberapa Warga Negara Indonesia yang kebetulan ke Afganistan melalui Pakistan dan sebagainya dan sebagainya, ini kan *ironical*. Nah, dalam konteks 2 hal tadi, simbolik maupun eksidental, saya kira meningkatkan status kesepakatan menjadi Undang-Undang itu menjadi penting tapi kalau yang lebih konkret-konkret Pak, konkret itu misalnya nanti dapat untung ekonomi berapa, dapat atau tidak *transfer of technology* nuklir dan seterusnya, terus terang saya sangat pesimis *gitu* ya. Jadi monggo saja kalau itu mau menjadi pertimbangan, ada juga pertimbangan lain yang sebenarnya pikiran yang agak simplistis, yaitu adalah *toh nggak* mengganggu Pak kalau diratifikasi dan dibuat menjadi Undang-Undang kan *gitu*, sesuatu itu kan meskipun tidak baik dan tidak apa, menguntungkan, tapi juga tidak merugikan dan orang lain menganggap itu sebagai sesuatu bahwa Indonesia mengakui Pakistan lebih baik, ini kan penting juga dari segi *image politik*, tapi kalau soal Undang-undang itu kan di Indonesia juga bukan rahasia Pak, Undang-Undang itu pada akhirnya akan memerlukan beberapa turunan untuk bisa dilaksanakan. Dalam tradisi *legal* sistem di Indonesia, Undang-undang belum bisa dilaksanakan sebelum dipenuhi oleh beberapa hal, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan seterusnya dan seterusnya itu, Undang-undang yang pernah kita tetapkan Tahun 2002 misalnya Undang-Undang Pertahanan Negara saja sampai sekarang turunannya itu belum genap Undang-Undang TNI juga belum genap dan seterusnya. Jadi ini juga sebenarnya agak kalau misalnya besok diratifikasi dan sebagainya, kapan kemudian akan bisa diimplementasi. Tapi ini saya kira pertanyaan yang mungkin tidak perlu saya ajukan karena kalau dijawab betulan, itu akibatnya kita tidak mengukuhkannya menjadi Undang-Undang kalau mau berfikir positif saja, itu lebih baik bahwa kalau diratifikasi menjadi Undang-Undang ini tidak akan mengganggu, tidak akan menimbulkan hal yang buruk, akan membuka ruang lebih baik, akan membuka apa? *Image* Indonesia di mata Pakistan bahwa Indonesia adalah negara yang memperhatikan kepada Pakistan, menjaga keseimbangan antara Pakistan dan India dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi bukan merupakan kalkulasi-kalkulasi yang agak konkret perhitungan itu. Saya ingin kembali sedikit kepada Pak Salim Mengga tadi ada intelijen, ada BAIS, ada, dan seterusnya itu ya. Saya kira memang betul, tapi BAIS sebenarnya sudah menjadi koordinator sejak Inpres Tahun 2005 dan kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang 17 pada Tahun 2011, cuma ya Pak Salim tahu persislah bagaimana praktek itu katakanlah kepada siapa BAIS atau Atase Pertahanan dan Atase Militer di Pakistan akan melapor saya kira menurut Pasal 76 Undang-Undang TNI, mereka tetap menjadi bawahan Panglima TNI dan orang pertama yang akan dilaporkan pasti Panglima TNI, baru dari Panglima TNI itu akan dilaporkan kepada katakanlah sampaikan kepada Kepala BIN, ini persoalan apa namanya klasik yang tadi saya sebut maka ada pasang surut hubungan antara Markas Besar TNI dengan Pejabat misalnya, sangat tergantung kepada individualnya. Jadi BAIS secara resmi dan juga masih tetap bernaung di bawah Panglima TNI karena memang, memang Tentara ya itu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kus ya.

Jadi memang Pak Salim tadi juga betul masalah intelijennya memang perlu, karena 2 kali saya ke Pakistan kita banyak di-*handle* oleh Athan Pak, Atase Pertahanan yang ada yang memang orang BAIS waktu itu. Jadi mungkin ini cukup perlu kita pandang perlu, namun demikian karena masih ada teman-teman kita yang lain kita ijin untuk sesi kedua Pak Kus untuk...

F-PD (DJOKO UDJIANTO):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tanya jawab tetap masih dalam masalah Pakistan. Nah mungkin Mas Djoko, *monggo* Mas, Pak Djoko.

F-PD (DJOKO UDJIANTO):

Terima kasih Pak Ketua.

Ini kita bodoh-bodohan saja, karena kita baru Pak Kus di Komisi I ini, saya terima kasih sekali apa, dapat masukan yang sangat luar biasa, apalagi ini kan RUU ini kan pasti akan dijadikan Undang-Undang, di sisi lain kita ini mempunyai Industri Strategis yang sudah berjalan, ada PAL, ada PINDAD, segala macam, tentunya kerja sama ini kan mesti harus menguntungkan ya Pak ya. Kalau tidak menguntungkan, berarti bukan kerja sama, tapi sama-sama kerja *gitu*. Nah pertanyaan kita Pak, kira-kira apakah dengan adanya Undang-Undang nanti ini kira-kira apa yang diharapkan dari segi lin dululah, dari segi barangkali kalau dari segi persenjataan barangkali apakah kita lebih canggih atau Pakistan lebih canggih, kita juga belum mengerti ya, tapi apakah tidak lebih baik kerja sama ini ke personal ini menaikkan apa, SDM kalau masalah wawasan pertahanan ya saya cuma mau melihat saja, bahwa negara kita kan negara kepulauan pasti sistem pertahanannya juga berbeda. Kira-kira bobot yang akan kita anukan, *stressing*-nya itu ya, di dalam Undang-Undang nanti menurut Bapak itu apa, apakah di segi personilnya, apa dipertahanannya, apa diperalatannya atau di apanya Pak. Saya kalau melihat di sini itu mungkin SDM nya yang lebih lebih fokusnya ya karena kalau, apa lagi yang disampaikan Pak Salim Mengga bahwa kalau kita mau beli senjata dengan merk dari Amerika atau merk dari negara-negara asalnya pun kita mesti harus dapat ijin dari negara asal ini. Berarti apa? Berarti kita tidak akan mungkin mengadopsi teknologi yang dari Amerika secara gratis dengan kerja sama antara Indonesia dengan Pakistan. Nah, kira-kira Pak Kus, menurut Pak Kus, apa *stressing* kita di dalam rangka apa namanya, kerja sama pertahanan ini antara Indonesia dengan Pakistan?

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih mas Djoko, mungkin Pak Darizal, ada?

Silakan Pak Darizal.

F-PD (DARIZAL BASIR):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Bapak Kusnanto yang saya banggakan.

Perkenalkan Pak, saya Darizal Basir Pak, kita dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan I Sumatera Barat I. Latar belakang saya memang militer Pak. 27 tahun, tetapi saya banyak dulu bergerak di bidang taktis dan belum strategis sehingga saya terpaksa meninggalkan medan tempur yang gersang itu Pak. Kata Pak Gamari saya beralih ke medan tempur yang subur. Jadi masalah-masalah seperti ini memang sudah lama saya tinggalkan dan saya harus belajar lagi ya, banyak, maka untuk itu barangkali kalau pertanyaan saya sifatnya bodoh, ya Bapak maklum saja, di dalam rangka kita menyusun pertahanan Pak, kan biasanya kita berangkat dari hakekat ancaman kan. Nah, sesuai dengan perkembangan ilmudan teknologi era sekarang ancaman kita itu kan tidak fisik lagi, sudah multi dimensional, fisik dan non fisik yang lebih banyak itu malah non fisik, ancaman yang bersumber dari masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga faktor-faktor keamanan ya, seperti misalnya gangguan terorisme, imigran gelap ya, narkotik, pencurian kekayaan alam kita, termasuk bajak laut dan kerusakan lingkungan. Nah, dalam kondisi sekarang ya, mana kita yang lebih baik ya? Memikirkan kerja sama langsung di bidang pertahanan atau kerja sama di sektor lain yang bersifat ancaman bagi negara kita yang non fisik tadi, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, sebenarnya Bapak sudah jelaskan juga tapi saya ingin memperdalam lagi ya apa sih sebenarnya keuntungan yang lebih konkritnya kalau kita membangun kerja sama pertahanan dengan Pakistan, mengingat negaranya dari segi teritorial kan jauh ya, kemudian tidak berbatasan langsung dengan kita dan dia dilingkari oleh negara-negara lain yang punya

pengaruh besar terhadap Pakistan. Pak Salim tadi juga mengantarkan lebih banyak pengaruhnya Amerika. Nah kalau kita bangun kerja sama pertahanan ya keuntungan yang jelas bagi kita teknologi barangkali mungkin tidak bisa kita ambil, karena teknologi persenjataan mereka kan dari Amerika. Paling-paling mungkin nanti pertukaran pendidikan ya, latihan Bersama, itulah barangkali yang kita bisa manfaatkan. Kemudian yang ketiga, 10 tahun atau 15 tahun lebih rencananya terhambat yang mulai dicetuskan dulu 2001 ya Pak sudah 14 tahun. Nah ini tentu ada masalah ini masalahnya yang lebih berat internal kita yang membuat ini agak terlambat mungkin dengan mempertimbangkan kehati-hatian, dengan faktor kehati-hatian ya atau dampak dari negara-negara lain kalau kita bangun kerja pertahanan atau mungkin juga dari external di Pakistan. Nah, itulah barangkali Pak ya pertanyaan bodoh, mengawali ya tugas di Komisi I ini, mudah-mudahan saya bisa fokus kembali ya pada sektor pertahanan dan luar negeri.

Demikian, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Darizal, mungkin satu lagi Pak Elnino Pak.
Silahkan Pak Elnino, yang di.belakang.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Ya baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Kus, Pimpinan, dan para Anggota DPR yang terhormat,

Saya sederhana sebenarnya Pak, ini kita juga ini harap maklum karena masih baru, pertanyaannya sangat mendasar dalam kerja sama dengan Pakistan ini dan juga di sini kami juga sedang membahas tentang Timor Leste. Sebenarnya menurut Bapak ini, ini kepentingan siapa sih *gitu* ini, ini kepentingan Pakistan kah atau kita yang berinisiatif *gitu* untuk kepentingan kita? Kalau tidak ada kepentingan Pakistan dan tidak ada kepentingan Indonesia, ya pasti nggak ada ini kan? Cuma ini kira-kira inisiatifnya dari mana? Benefit bagi setiap Pihak ini apa hanya sekedar citra? Ok, kita sudah kerja sama dengan Pakistan, begitu aja, seperti yang Bapak bilang atau memang secara teknis mungkin ada *gimana*, ada proyek nggak yang kemudian menjadi apa namanya, turunan dari perjanjian ini? Kira-kira begitu sebenarnya ini, nah itu yang pertama. Yang kedua, soal Timor Leste ya, mungkin sudah dibahas ya Pak ya, saya agak, belum ya? Nah, soal Timor Leste ini oh ini habis ini ya Timor Leste ya? Supaya saya bertanya nanti *aja*.

KETUA RAPAT:

kalau soal Timor Leste setelah ini selesai Pakistan kita masuk..

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Oh ya baiklah kalau *gitu*, saya kira itu dulu untuk Pakistan, karena hubungan apa namanya, agama itu kan, ini sudah, sudah blur sebenarnya ini, kira ini sudah tidak terlalu terikat lagi secara pemerintahan ya, bukan secara, masyarakat ada juga yang sudah ekstrim-ekstrim itu, tapi secara pemerintahan kita tidak terlalu terikat lagi dengan agama suatu negara atau apa *gitu*, makanya saya pertanyaannya ya maaf begitu, kira-kira proyek apa sih ini yang menjadi hasil dari perjanjian ini? Kira-kira *gitu*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Elnino, masih ada Pak Biem ya, silahkan Pak Biem.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M.):

Anggota Dewan yang saya hormati dan Pak Kusnanto Anggoro,

Terima kasih atas paparannya tadi yang yang sangat membuka kita semua, terutama saya memang baru juga di sini di Komisi I, soal keamanan pertahanan. Jadi jabarkan tentang simbol-simbol, artinya apa namanya, kalau suatu kerja sama itu hanya merupakan sebuah simbol yang memang berdampak lebih berdampak *gitu* ya, daripada kegiatan yang operasionalnya tadi kita juga tahu, kita mendengar dampak Pakistan ini juga ke India yang

merupakan negara yang, yang kompetisi lah katakan begitu. Nah, kalau dampak ke negara lain yang memang kita tahu tadi Pak Kusnanto juga sampaikan, sebenarnya apapun yang kita lakukan itu Amerika tetap ada pengaruhnya. Nah, pengaruh dengan simbol itu dengan kita melakukan kerja sama yang lebih, lebih tinggi lagi dengan kita ratifikasi Undang-Undang ini itu dampaknya seperti apa Pak? Kalau hanya sebagai simbol, tetapi kalau kita melakukan suatu kegiatan yang operasional itu seperti apa? Ini yang ingin saya tanyakan kenya ya, bukan ke India, ke Pakistan tetapi negara adidaya itu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Biem, mungkin masih ada yang lain sebelum kita ...,ah Pak Gamari, silahkan.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota yang saya hormati, serta Pak Kusnanto Anggoro sebagai Narasumber.

Saya terlambat, mungkin pertanyaan saya sudah ditanyakan, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi lagi ada 2 halaman yang Bapak tulis dan saya baca sekilas di halaman yang Bapak tulis ini, Bapak sampaikan bahwa sebetulnya kerja sama pertahanan Indonesia dengan Pakistan sudah dimulai sejak lama, yaitu Tahun 2001 dan kemudian dengan Timor Leste pada 2012. Di dalam *paper* Bapak ini, Bapak juga menanyakan sampai seberapa besar *urgency* kerja sama itu untuk dikukuhkan dalam sebuah persetujuan dan apakah ratifikasi atas Persetujuan itu perlu dikukuhkan dalam bentuk Undang-Undang atau cukup Keputusan Presiden saja. Dari Pak Kusnanto Anggoro atas pertanyaan ini saya belum mendengar jawaban Bapak. Apakah harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang atau cukup dengan Keputusan Presiden saja? Ini mungkin disampaikan, saya tidak mendengarnya, maka perlu ketegasan dari Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan itu karena kami memperoleh surat dari Presiden Pak. Presiden ini kan menyampaikan kepada kita *draft* RUU ya untuk kita bahas, apakah *draft* RUU yang disampaikan oleh Presiden kepada kita ini perlu segera kita respon dan kita setuju untuk dituangkan dalam Undang-Undang, karena ini yang mau kita Paripurnakan atau belum dianggap perlu *gitu*, ini cukup dengan karena ini kan harus respon surat dari Pemerintah ini, yang jelas inisiatif ini datang dari Pemerintah. Nah, Pemerintah punya inisiatif untuk mengesahkan atau mengukuhkan persetujuan ini dalam bentuk Undang-Undang. Lalu kita kaji ini, makanya kita undang Pak Kusnanto Anggoro. Saya Pak Pimpinan, ingin memperoleh pertimbangan yang lebih tegas itu, perlu nggak atau cukup dengan Keputusan Presiden? Nah, masukan dari Bapak ini penting sekali maknanya buat kita.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih ya Pak Gamari.

Mungkin Pak Budi atau Pak Pandu ada? Nggak ada, oke. Ada 5 pertanyaan, juga masukan Pak Kus dan ada juga antara pertanyaan itu yang mungkin imbang-imbang, apa manfaatnya, gunanya dari Pak Djoko tadi memang kita sudah punya juga industri-industri pertahanan yang cukup strategis, itu dengan Pakistan itu mau diapain, umpamanya kan dari Pak Darizal Basir, hampir sama juga keuntungan konkritnya apa kira-kira apa memang harus di bidang pertahanan atau bidang lain kemudian masalah yang mengganjal apa, *kok* terlalu lama apa yang seperti disampaikan Pak Kusnanto tadi, kita mungkin melihat negerinya juga belum stabil, ya banyak masalah tadi Pak Elnino juga hampir sama intinya kepentingannya apa? Ya hampir sama dengan Pak yang lainnya tadi, *benefit*-nya apa kemudian masalah agama mungkin tidak terlalu panjang sama juga dengan Pak Dim tadi nampaknya kerja sama ini apa ini. Nah kemudian Pak Gamari. Nah, tadi ya betul juga, apakah memang harus dengan Undang-undang atau hanya cukup dengan Keppres saja, tapi ya dalam pergaulan internasional biasanya memang ada etika-etika internasional ya, dimana dengan negara lain kita *bikin* Undang-undang

nanti negara yang kita klasifikasikan sebagai negaratidak umpamanya, ini juga mungkin jadi pikiran, tapi tentu kita serahkan ke Ahlinya, Pak Kusnanto *monggo* Pak Kusnanto, mungkin berikan masukan kepada kita, silahkan Pak ya. Mudah-mudahan masih bisa menjawab, ini agak sulit ini, sekali lagi karena saya menafsirkan, kadang-kadang persoalan ratifikasi penyusunan Undang-Undang itu kan persoalan yang sangat psikologis ya apalagi, terutama bagi Dewan Perwakilan Rakyat, terutama melihat rapor atau *record* masa kerja yang kemarin itu kan tidak terlalu bagus. Jadi dalam konteks itu ya nggak apa-apa juga, ini kan akan dihitung kredit pointnya misalnya begitu, tapi kalau yang pertanyaan yang seberapa besar *urgency* dan sebagainya dan sebagainya tadi memang sesungguhnya pertanyaannya menjadi katakanlah, mengapa harus diangkat menjadi Undang-Undang *wong* tanpa Undang-Undang juga sudah jalan 10 tahun dan ini jalan-jalan terus juga. Lalu apa yang bisa dijanjikan dalam kerja sama yang lebih baik dengan Pakistan itu sebenarnya juga tidak banyak, misalnya begitu. Jadi berlandaskan pada persetujuan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahananpun juga sudah berjalan baik dan sebagainya. Jadi bisa, tapi maka sebenarnya isunya itu berbeda. Jadi pertanyaan Pak Gamari misalnya, ini perlu Undang-undang atau Keppres. Untuk saya Keppres cukup lebih simpel, lebih membuka ruang, apalagi mengingat bahwa katakanlah ruang yang akan dijanjikan untuk bisa dikembangkan lebih jauh dikelak kemudian hari ini tidak terlalu banyak atau kalau seandainya terlalu banyak ada satu klausul seingat saya. Di dalam persetujuan itu, yang mengatakan bahwa membuka ruang kerja sama yang lebih baik itu dimungkinkan, butir terakhir antara lain mengatakan bahwa bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah ini kan bisa bidang apa saja dalam persetujuan tertulis seperti itu. Jadi ini lagi-lagi kalau seandainya tidak menjadi apa, diratifikasi dengan Undang-undang juga bisa, persoalannya adalah di Indonesia. Nah, Undang-undang tentu mempunyai makna tersendiri, sangat penting itu memberikan dokumen legal, itu menjadi instrumen bahwa Dewan Perwakilan Rakyat untuk akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, itu menjadi alat bagi publik untuk bisa menagih janji kepada Pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Namun pelaksanaan Undang-undang itu kerap kali terstriksi atau terkendala oleh tidak kreatifnya para pejabat dan penyelenggara negara sejauh menyangkut kerja sama pertahanan dengan Pakistan misalnya. Ada satu butir yang tadi saya sebut bahwa kerja sama-kerja sama di bidang lain itu sebenarnya sangat dimungkinkan asal disepakati oleh kedua belah pihak. Pertanyaannya, kenapa selama ini tidak pernah berkembang dari itu kan apakah para pejabat negara itu tidak mempunyai otoritas untuk misalnya menafsirkan apa saja yang perlu dikembangkan, sebenarnya mungkin, kalau kita ambil contoh saja, di dalam Undang-Undang TNI saja yang Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, di Pasal 21 misalnya itu mengatur tentang bagaimana Panglima TNI bisa menjamin kerja sama dengan pihak luar negeri, retriksinya cuma satu, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan harus sesuai dengan orientasi dan politik luar negeri Indonesia. Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 memberikan kewenangan kepada Panglima TNI untuk bisa menafsirkan strategi dan operasi taktik militer. Gabungan atau penafsiran ulang Pasal 18, 19, dan 21 saya kira kemudian akan bisa memberikan kewenangan atau kemungkinan bagi Panglima TNI untuk mengoperasionalkan kerja sama pertahanan seperti apa yang harus dilakukan dengan siapapun juga, dalam hal ini misalnya dengan Pakistan. Gabungan antara Pasal 18, 19, dan 21 Undang-Undang TNI dengan persetujuan ini misalnya, Indonesia-Pakistan Pak Darizal, tentu saja akan memberi ruang bahwa sebenarnya bisa dikembangkan lebih dari sekedar dialog masalah-masalah strategis, masalah-masalah industri pertahanan, latihan kemiliteran, maupun tukar menukar personil. Jadi apapun sebenarnya bisa kan *gitu*. Jadi mengapa kemudian tidak bias, tapi ini saya kira bukan persoalan Undang-Undang, ini persoalan lain, mungkin justru persoalan bagi Dewan Perwakilan Rakyat atau Komisi I yang tidak pernah menanyakan kepada Panglima TNI atau Menteri tentang rencana-rencana yang akan dilakukan di kelak kemudian hari, tapi Pak Asril ini saya kira persoalan lain sama sekali ini kan peran, perang Dewan Perwakilan Rakyat itu kan juga macam-macam kan *gitu*, ada kontrol anggaran, ada kontrol *policy*, lalu ada satu lagi yang terkait dengan legislasi tentu ya, legislasi ya kita bisa menilai macam-macam, tapi sejauh menyangkut yang kedua yang kontrol kebijakan, kan kadang-kadang yang dipersoalkan itu kebijakan yang agak besar begitu, tapi bukan *technical policy*, misalnya mengenai apa yang akan dilakukan oleh Panglima TNI dan seterusnya, buktinya juga, ini merupakan salah satu faktor, ini sebagian menjawab pertanyaan Pak Darizal Basir. Mengenai

kenapa begitu lama, karena juga tidak ada yang menanyakan jadi sebagian dari soal persoalan politik katakanlah reformasinya atau perubahan organisasi atau apa pun di Indonesia terkait dengan pertahanan negara dan politik luar negeri, ini kerap kali menjadi persoalan politik pada pembicaraan pada tataran Undang-Undang menjadi isu sentral hanya pada tataran-tataran hubungan DPR dengan eksekutif, kita tidak pernah tahu seberapa jauh Undang-Undang itu diaudit jadi apa yang namanya legislatif audit, seberapa lama Undang-Undang itu menjadi Peraturan Pemerintah dan sebagainya dan sebagainya tidak, tidak pernah menjadi isu politik di Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak heran kalau ada beberapa bagian dari reformasi, khususnya di bidang pertahanan negara, politik luar negeri, dan yang lain-lain, yakni Komisi I, itu juga tidak bisa berkembang dengan cukup baik Panglima TNI misalnya tidak cukup melakukan perubahan organisasi di dalam BAIS karena tidak pernah ada yang nagih Panglima TNI sebagai seorang yang bernaung di bawah Presiden dan sebagai seorang yang bekerjasama secara terkoordinasi dengan Menteri Pertahanan tentu saja menafsirkan Pasal 18 Undang-Undang TNI, bahwa dia perlu katakanlah mendapatkan perintah sebelum melakukan sesuatu, tapi juga sebenarnya ada ruang untuk kreativitas dan imajinasi, tapi saya kira ini soal lain Pak Darizal dan mungkin Pak Alimin juga tertarik soal-soal seperti itu, ini soal lain karena yang mungkin menjadi isu politik di Indonesia itu terbatas pada pembicaraan pada tataran Undang-Undang berapa lama sebuah Undang-Undang itu menjadi, atau lengkap di Peraturan Pemerintah dan seterusnya tidak pernah menjadi isu politik baru sejak Tahun 2008 ada peraturan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perubahan organisasi maupun ketentuan-ketentuan tambahan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini harus dilengkapi paling lama 2 tahun, itu baru Tahun 2008 tetapi apakah ada konsekuensinya? *Nggak* ada juga saya tidak yakin misalnya kalau Komisi I atau Dewan Perwakilan Rakyat sadar kalau baru satu dari 4 atau 6 keputusan turunan yang diperlukan oleh Undang-Undang Industri Pertahanan itu sudah dibuat, padahal Industri Pertahanan itu seingat saya di *approve*, disetujui pada Tahun 2012 dan pasal terakhir mengatakan bahwa selambat lambatnya 2 tahun setelah Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, seluruh ketentuan yang terkait dengan perubahan organisasi maupun ketentuan-ketentuan tambahan harus selesai, artinya adalah pada tanggal 17 Juni 2014, sekarang baru jadi 1, tapi kan tidak pernah ada yang bertanya *tho*? Iya kan, *nggak* pernah ditanyakan, tidak pernah menjadi isu politik jadi, itu juga menjadi salah satu faktor sebagian untuk Pak Salim Mengga. Kenapa ini begitu lama Pak, karena *nggak* pernah ditanyakan *lho* kalau yang bertanya saya itu kan *nggak* masalah itu Pak kalau yang bertanya wartawan, wartawan mungkin juga tidak bertanya, tapi kalau DPR yang bertanya kenapa misalnya Undang-Undang ini yang mewajibkan ada turunan segitu banyak Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan seterusnya yang sudah diberi *deadline* Pak Darizal Basir, 2 tahun itu tidak muncul dari DPR itu pasti, jadi saya kira ini persoalan kita bersama persoalan yang saya kira juga harus menjadi diingatkan kapan-kapan kepada Pemerintah untuk itu. Nah, yang terakhir yang saya kira sekali lagi saya ingin menegaskan kalau saya boleh memilih akan lebih nyaman Keppres daripada Undang-undang kalau saya Presiden, saya juga akan memilih Keppres daripada Undang-Undang karena efek kontimennya akan lebih enak kalau Keputusan Presiden daripada Undang-Undang, tapi kalau saya Dewan Perwakilan Rakyat Pak Darizal, tentu saja akan menjadikan ini menjadi Undang-Undang karena akan mempunyai makna politik yang jauh lebih menguntungkan membuka opsi kepada publik untuk bisa menuntut akuntabilitas dan seterusnya, selama ini hanya menjadi Keputusan Presiden itu agak sulit karena hanya sebagian kecil dari Warga Negara Indonesia yang sadar bahwa ada Keputusan Presiden sebagai legal basis untuk melakukan sesuatu dan pada tataran akuntabilitas akan sulit untuk menuntut akuntabilitas Presiden pada tataran Keputusan Presiden. Jadi Undang-Undang akan memberikan opsi lebih baik, dengan kata lain kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih memberi ruang untuk pendewasaan *democratic governance*, Undang-Undang lebih baik, tapi kalau pertanyaannya adalah efektivitas, seberapa besar Undang-undang ini akan menjadikan katakanlah Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dengan Pakistan akan lebih efektif, akan lebih konkrit, jawabannya negatif *angel* ini, itu sebabnya perlu Komisi I dan Dewan Perwakilan Rakyat, namanya juga Dewan itu kan Dewo betul *nggak*? Terima kasih Pak Kusnanto, sebelum kita tutup untuk *session* untuk Pakistan, mungkin masih ada yang mau *nyampekan unek-unek* Pak Gamari ini.

Silahkan Pak, terakhir.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI):

Ya sejatinya saya sependapat dengan Pak Kusnanto ya karena disamping apa yang Pak Kusnanto jelaskan tadi implikasi dari sebuah Undang-Undang itu memang tidak sesederhana kalau itu Keputusan Presiden misalnya di suatu ketika kita memang harus melakukan revisi, maka mekanisme dan prosedurnya lebih sulit daripada Keputusan Presiden. Kalau Keputusan Presiden karena ini tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi ini, ini mudah jadi untuk ini memang kita akan minta, saya usul pada Pimpinan untuk minta penjelasan lebih jauh lagi dari Panglima TNI atau Menteri Pertahanan apalagi ini kan *draft* RUU yang disampaikan kepada kita ya, tanpa mengecilkan arti atau substansi di dalamnya ini kan hanya 2 halaman dengan penjelasan 2 halaman juga, kemudian yang banyak ini kan naskah akademik saja. Jadi substansinya sebetulnya tidak mengandung substansi yang cukup detail mengatur lebih lanjut, itu cukup aja di Keputusan Presiden, ini kan hanya persetujuan atau *agreement* langsung diangkat jadi sebuah Undang-Undang padahal sesungguhnya Undang-Undang itu harus memuat secara lengkap yang mengatur masalah kerja sama pertahanan ini, tapi ini saya lihat tidak ada apa-apa hanya legalisasi saja lah itu legalisasi kan cukup Keppres ya. Saya kira saya sependapat dengan itu. Nah, tinggal kita bahas lebih mendalam Pak dengan memanggil Menhan maupun Panglima TNI baru kita mengambil sebuah keputusan untuk menjawab surat dari Pemerintah ini, ini kan surat dari Presiden walaupun waktu itu Presiden SBY kan, sekarang kan Presiden yang baru tetap melanjutkan apa yang dulu disampaikan oleh Pak SBY saya kira begitu Pak. Jadi kita memang sangat berterima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Kusnanto Anggoro itu, karena ini juga perlu kita kaji dengan mendalam

.....:

Catatan Pak, sebenarnya saya *nggak* ingin bilang, karena yang Anggota Dewan bukan saya, nanti kami yang bilang kepada....

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI):

...hanya memberikan opsi saja, kalau ini, ini, ini, itu, kalau pilihan lain kan.
Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gamari.

Ini mungkin perlu juga kita pikirkan. Kalau pertimbangan kita kan tadinya kalau ada Presiden mengajukan, berarti mereka dengan perangkat-perangkat dia sendiri pasti sudah ada koordinasi dalam pikiran kita, tapi kalau kita dalam, kita baca ini, kelihatannya itu sepertinya masih kurang ya koordinasinya Pak Zailani, perlu kita minta Dengar Pendapat dengan Menhan dan Panglima TNI. Nanti kita kaji setelah ada ini memang di dalam Dengar Pendapat Umum ini Pak Kusnanto, kita belum mengambil kesimpulan, tetapi kita menampung dulu semua masukan dengan saran untuk pertimbangan mengenai RUU ini, antara lain tadi dari Pak Kusnanto sudah cukup banyak, dari Pak Gamari juga apa perlu kita pendalaman kepada Menhan dan Panglima TNI juga penting, karena secara kebijakan memang Menhan begini, begini diatur, tapi secara operasional kan nanti Panglima TNI. Memang dua-duanya perlu kita Dengar Pendapat mereka, cuma nanti lewat orang-orang kita, kita akan cek, apakah memang ini sudah melewati 2 badan ini, kalau sudah ya *nggak* ada masalah, yang ini akan kita kaji ulang itu. Terima kasih Pak Kusnanto ya, sisi pertama tentang Pakistan ini sudah kita selesaikan ya. Kita rencana, kalau bisa sidang atau pertemuan kita ini sampai jam 1 sampai jam satu kita akan masuk masalah yang kedua adalah masalah Timor Leste Pak. Kalau dulu kita bilang Timor Timur ini mengingatkan saya, Pak Darizal, Pak Salim, dan lain-lain ini bernostalgia dulu Pak di sana Pak. Jadi memang itulah yang salah satu faktor yang *membikin* pengalaman untuk kami-kami, waktu itu Perwira Muda. Nah sekarang sudah tua, sudah pension, tapi ini historis begitu masih melekat kuat dibenaknya para Perwira TNI ini. Ini saya rasa memang sangat perlu Pak. Mungkin di Pak Kusnanto suruh nyebutkan kota-kota ini, kita hampir hafal semua itu, ini mulai dari Barat ke Timur ini sudah kita sapu bolak-balik Pak, kan *nggak* terlalu besar Timor Leste, kita sudah bolak-balik dengan segala macam dinamikanya. Jadi ini mungkin sangat-sangat perlu kita bahas mungkin Timor Leste ini apalagi ini bertetangga langsung dengan kita, malah sampai sekarang di daerah

pulau apa namanya, Flores itu memang itu ada perbatasan kita dengan dia, dan itu kelihatan berjalan lancar meskipun ada apa namanya kadang-kadang perdagangan yang Ellen saling sangat bangga *anu* ya ke atas Rusia di final tahun agama, tapi itulah dinamika nya seperti pada jam pasir beda ya udah masalah perbatasan itu *gimana* pahit getirnya beliau sudah tahu. Jadi tolong Pak Kusnanto berikan gambaran dan penjelasan mungkin juga masukkan, bagaimana tentang konsep untuk kerja sama kita di bidang pertahanan ini dengan Timor Leste ini karena demikian hebatnya historis yang sudah pernah terjalin antara kita dengan Timor Leste malah dia merupakan dulu masuk dalam bagian NKRI ya yang pada akhirnya lepas.

Silakan Pak Kusnanto

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Ya, terima kasih.

Struktur narasi yang ada di dalam naskah Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Timor Leste itu hampir sama dengan naskah Persetujuan Kerja Sama Indonesia Pakistan. Kalau ada sedikit perbedaan itu, terutama terkait dengan bagaimana kedua belah pihak dalam kasus hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste itu mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. Saya kira ini sebagian diantaranya semangat yang juga pada Tahun 2008 ketika pada awalnya dibicarakan dan kemudian Tahun 2010-an disepakati dengan Timor Timur ini di Indonesia kita juga sedang berbicara tentang Undang-undang Rahasia Negara. Jadi ada ini kan kira-kira apa persepsi atau pandangan itu kan katut *gitu* ya, kita sedang konsen tentang rahasia negara di Indonesia itu juga masuk juga dalam konteks dengan Timor Timur itu kemudian yang lain lagi perlu saya gambarkan, mau tidak mau Timor Timur itu adalah tetangga Indonesia, kita punya pengalaman yang buruk dengan Timor Timur dan kedua belah pihak saya kira mempunyai pengalaman yang buruk sehingga dengan demikian menjalin hubungan atau bahkan mengukuhkan hubungan itu pada tataran formal itu menjadi sangat penting meskipun simbolik laki-laki, tapi kalau saya ditanya mana yang lebih penting Timor Leste atau Pakistan, saya akan mengatakan bahwa Timor Leste lebih penting dalam konteks itu karena lebih dekat, karena kita punya perbatasan darat, karena kita punya 3 wilayah di sekitar Atambua yang belum selesai dari sudut pertahanan, karena kita punya 128 kilometer yang dan seterusnya dan ini. Saya kira untuk 20 tahun kedepan ke depan selalu akan ada persoalan antara Indonesia dan Timor Timur, sehingga dikukuhkan dalam sebuah kesepakatan persetujuan tentang kerja sama itu menjadi sesuatu yang saya kira amat Pak Kus. Kedua, dari segi riil politik kita berada di atas lah kalau dibandingkan dengan Timor Timur apalagi sejauh menyangkut kekuatan militer kemampuan personil militer dan seterusnya dan seterusnya kita tahu bahwa tentara Timor Timur jumlahnya nggak ada 750 orang sekarang dan Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang sangat baik untuk menularkan pengalaman-pengalaman reformasi militer yang kita berlangsung selama 10 tahun terakhir. Mau tidak mau harus diakui bahwa katakanlah Tentara Indonesia lumayanlah dari segi kemampuan macam-macam dan terutama dari segi reformasi pertahanan negara maupun reformasi militer itu akan menjadi kesempatan yang amat baik bagi Indonesia untuk katakanlah secara tidak langsung membina tentara Timor Timur menjadi seakan-akan seperti tentara dengan mentalitas profesionalisme orientasi seperti Tentara Indonesia, dan bisa dipastikan kalau peluang untuk itu sangat besar, bisa dipastikan bahwa Timor Timur tidak cukup mempunyai pilihan lain untuk bisa melakukan itu tanpa kerja sama dengan Indonesia, karena Timor Timur itu menurut saya sekarang menjadi anak utang anting. Untang-anting itu anak tunggal dan piatu pula semakin jauh dengan Portugal karena Portugal juga semakin kehilangan uang, semakin sedikit bantuannya dari Uni Eropa dan seterusnya dan yang kedua janji yang dulu pernah dikatakan oleh Australia tidak cukup terpenuhi tidak heran dan ini mungkin bisa berbahaya sejak beberapa bulan yang lalu Timor Timur berkiblat kepada Cina dan menurut saya itu tidak terlalu bagus bukan, apa namanya, dari segi riil politik Indonesia seharusnya mempunyai pengaruh yang lebih besar di Timor Timur dari pada Cina, dan kalau kita melihat elite politik Timor Timur sekarang misalnya, saya kira lebih banyak lulusan Atmajaya dan Sanata Dharma daripada lulusan Universitas Dili saya kira lebih banyak Elit Timor Timur sekarang Timor Leste yang lebih fasih berbahasa Indonesia daripada berbahasa Tetum maupun Bahasa Portugal. Jadi saya kira hubungan ini perlu di dengan baik apalagi kalau kita mengingat bahwa 20 atau 30 tahun ke depan akan selalu ada persoalan dengan Timor

Timor lintas batas jadi Kualima atau Bobonaro ke Timor Barat itu kan keluarga antar keluarga. Jadi nggak mungkin itu bisa dibendung yang perlu dikembangkan sebenarnya adalah *what next*, apa setelah katakanlah ini menjadi Undang-Undang, misalnya bagaimana membangun semacam pasar bersama di beberapa tempat, misalnya bagaimana menyediakan fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak disebrang perbatasan misalnya adalah bagaimana membangun pos-pos yang bisa diawasi silih berganti antara Tentara Timor Timur dan seterusnya, jadi ini lagi-lagi menjadi pertanyaan apakah kesepakatan yang kita miliki Tahun 2010 itu kemudian memberi ruang itu, jawaban saya iya, yaitu ada pasal yang di paling akhir itu menyebut kerja sama dapat dikembangkan berdasarkan pada beberapa hal yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Nah apakah ini bisa ditagih, kan begitu tapi ini sebenarnya ndak ada hubungan dengan apakah statusnya itu tetap kesepakatan seperti itu, atau statusnya menjadi sebuah Undang-Undang yang diratifikasi menurut saya tidak ada hubungan, karena teksnya sudah berbunyi dan itu selama ini sudah menjadi landasan kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste lagi jalan terus Pak ya sama itu tergantung tergantung segan kepada program *kick*, tapi saya ada setijana dalam hal program program itu tidak ada perubahan status kerja sama itu makin intensif atau tidak, nggak ada hubungannya dengan ratifikasi hubungannya lebih kepada seberapa besar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI itu kreatif dan imajinatif untuk melaksanakan apa yang diwajibkan dalam kesepakatan itu, tugas Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya menanyakan paling tidak sebagai bagian dari kontrol kebijakan sudah direalisasi, diwujudkan ada perkembangan atau tidak beberapa hal yang tertulis didalam misalnya, itu cukup untuk menagih kepada Pemerintah, sekali lagi ini adalah posisi yang saya, bukan posisi politik tapi posisi realistis dan objektif, lain pertimbangannya kalau dikatakan misalnya bahwa alangkah bangganya Xanana Gusmao, ketika pada masa akhir pemerintahannya, kesepakatan antara Indonesia dan Timor Leste bisa diratifikasi oleh DPR karena ratifikasi oleh DPR bagi elit politik di Timor Timur akan menjadi sebuah simbol legitimasi dan legalisasi politik bagi mereka, ini soal lain Pak, ini kan soal perasaan, tapi kita tidak bisa menafikkan bahwa perasaan itu tidak penting perasaan is sangat penting kan *gitu* legalisasi itu juga akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah orang katakanlah kita sebut sebagai bekas kolonial, katakanlah sebagai big brother yang baik hati katakanlah begitu, jadi mau nguwongke mau ngemong, ngemong itu Bahasa Jawa, artinya Bahasa Indonesiane opo iki, ngemong itu ya yang mau melindungi katakanlah begitu, kepada tetangganya yang lebih kecil, dalam hal ini adalah Timor Leste, ini besar sekali secara psikologis kalau kita faham sebagai jadi dengan demikian maka lalu ratifikasi ini akan lebih mempunyai makna human interest, psikologis dan diplomatik daripada yang lain-lain kalau yang lain-lain itu akan ya Pak Gamari saya kira tadi ... Sudah mengikuti masalah perbatasan cukup lama, masalah perbatasan dengan Timor Timur ini kan nggak maju-maju, cukup lama juga, dan kita tahu bahwa persoalannya adalah persoalan tehnikel, misalnya adalah Bakosurtanal yang untuk melakukan survei perlu 100 juta untuk menetapkan satu koordinat dan tidak mudah untuk membangun 128 koordinat disepanjang perbatasan Indonesia dengan Timor Timur, tidak mudah untuk menetapkan perbatasan disekitar Atambua, yang sebagian diantaranya terjadi hanya karena pergeseran tempat-tempat yang secara itu memerlukan kepastian dari segi geodetik survei kan *gitu*. masalah-masalah yang sebenarnya non politik lah, lebih terkait dengan masalah-masalah lapangan tetapi itu mengganggu, nah yang bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks itu sebenarnya adalah menagih kepada otoritas politik tolong pastikan, bahwa masalah perbatasan itu harus diselesaikan dengan target waktu tertentu tapi ini sekali lagi nggak ada hubungan dengan persetujuan antara Indonesia-Timor Timur dan saya tidak yakin kalau persetujuan pertahanan Indonesia-Timor Timur akan mempercepat penyelesaian persoalan perbatasan antara Indonesia-Timor Timur mengapa tidak bisa mempercepat, karena sebenarnya sekarang sudah ada yang bekerja secara khusus misalnya adalah Badan Nasional Penyelenggara Perbatasan, terus kemudian ada juga joint.... committee dan keterlibatan TNI maupun kementerian Pertahanan di dalam komisi-komisi itu juga sudah sangat besar, secara politik ada pertemuan reguler setahun sekali, persoalannya adalah persoalan-persoalan operasional yang terkait dengan geodetik survei, jadi mungkin begitu, jadi terutama untuk Pak Gamari jawaban perlu UU atau Keppres itu kadang-kadang tergantung dari bagaimana kita mengajukan pertanyaan kalau pertanyaannya efektivitas, objektivitas dan seterusnya tapi kalau DPR kemarin kan dikritik

banyak orang cuma sedikit menghasilkan Undang-Undang, ini kan lumayan Undang-Undang 2 Pasal diketok Undang-undang 2 pasal diketok kan lumayan itu Pak, *Iho* saya tahu juga, dan itu sah-sah saja kan terima kasih Pak Kusnanto ya, kita sudah dengar semua ini memang Timor-Timur ini antik, karena berbatasan langsung juga apa namanya Rayan juga masih bersaudara malah dari kita pun ada yang dapat istri disana ...bisa, saya nggak tahu Pak Salim dapat nggak apa nggak dulu ini, ini Timor-Timur itu yang turun-turunan Portugis itu Pak, waduh kayak Lamno Aceh itu kan, mata-mata biru juga banyak disitu nah ini ya, Pak Darizal aja dulu hampir kena, untug saya kasih tahu ya jadi memang dengan Timur ini memang ada semacam kontak Pak, karena begini ada dulu isu ada harta benda kita di sana *gimana* mengambilnya, apa di termasuk bumi hangus atau *gimana* kemudian ada mereka yang ikut mengungsi ke Timur kita, Timur Indonesia itu juga menjadi masalah itu, banyak pengungsi dan lain-lain, mereka juga pingin lagi mengambil harta bendanya belum ada komite bersama saya lihat didalam draft ini tentang hal itu, komite bersama yang ada baru sekitar masalah pertahanan, masalah keamanan, tapi masalah pengajuan yang tadi mungkin masih bersifat sosial dan lain-lain belum ada Pak jadi *gimana* menurut Pak Kusnanto ini sebelum ini saya kasih pertanyaan kepada teman-teman ini masalah itu juga mungkin terkait lama-lama putih berseru susiok Lie melenggak besok jadi masalah Tiam agama selaku thaha menjadi hit di DiLi tim perlu juga di kita sikapi bersama dim yang pertama Pak dan mungkin nanti teman-teman yang lain yang kira-kira Pak Sukamto dulu ya Pak Sukamto silakan Pak Kamto terima kasih Pimpinan Timor Timur ini Timor Leste sekarang ya memang dari sisi kwantitas memang kecil sekali ya, tetapi ini kan lokasinya ini sangat dekat dengan Indonesia dan saya kira dulu salah satu motivasi Indonesia masuk ke Timor Timur waktu itu saya kira kan lebih ke alasan geo politik ya, dari pada alasan-alasan ekonomi dan saya juga membayangkan kalau Timor Timur itu misalnya nanti memikat pakta pertahanan dengan sebuah negara yang bermusuhan dengan Indonesia di suatu saat ini akan menjadi problem strategis yang yang akan sangat mengganjal *gitu* nah oleh karena itu saya membayangkan juga Indonesia ini lebih baik berkawan baik dengan Timor Timur, Timor Leste ini dari pada melepaskan dan kemudian dia akan mencari teman semanya sendiri *gitu* kalau misalnya kita boleh memutar jarum sejarah, saya kira kalau kita ada pilihan lagi *gitu*, saya membayangkan lebih baik Timor Leste ini diberi kemerdekaan dan diberikan penguasa yang sangat pro Indonesia sebetulnya kan, tetapi ini sudah menjadi sejarah nah sekarang bagaimana caranya agar kita ini yang sudah melepaskan Timor Leste tetapi tetap saja Timor Leste menjadi kawan karib lah, saya sepakat sekali dengan istilah Pak Kusnanto kita bisa menjadi the good big brother bagi Timor Leste *gitu* nah oleh karena itu saya kira kalau ada perangkat yang bisa membuat kerja sama kita dengan Timor Leste lebih kuat dan lebih apa, lebih luas saya kira itu kok lebih baik daripada mempersempit hubungan dalam konteks pertahanan misalnya lebih baik kalau kita ini Indonesia, punya dalam pandangan saya ya, lebih baik Indonesia ini punya kerja sama militer yang erat dengan Timor Timur kalau dulu dengan tujuan Geostrategis itu kita masuk ke sana kemudian kita dibebani oleh persoalan-persoalan keamanan sehingga kita waktu itu kemudian memilih untuk membuat referendum, sekarang kan beban keamanan terhadap kekuatan Indonesia sudah nggak ada Pak urusan keamanan sudah ditangani oleh pemerintah intern Timor Leste nah tapi kalau kemudian kita juga bisa buat kerja sama pertahanan dan bisa menempatkan kekuatan taktis strategis kita di Timor Leste itu kan lebih menarik *gitu* sehingga itu juga tidak apa namanya tidak membuat timorleste itu merasa terancam terhadap Indonesia, satu, itu harus kita pastikan yang kedua, mereka juga tidak tergoda untuk membuat pakta dengan negara lain *gitu* itu satu sisi ya, sementara nanti urusan-urusan teknis seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kus itu memang perlu untuk segera diselesaikan, tetapi sekali lagi kan itu tidak tergantung kepada selesainya apakah ini menjadi Undang-Undang atau tidak ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kamto ya, mungkin yang lain?

Pak Salim, silahkan Pak Salim Mengga, mungkin nostalgia jangan-jangan ada yang ditinggal di sana ada yang tinggal, berapa orang? Berapa orang?

F-PD (SALIM MENGGGA):

Terima kasih Pak, saya Salim Mengga, Nomor 454 dari Partai Demokrat saya ingin pendapat dari Pak Kusnanto menyangkut posisi Timor Timur sebenarnya sebelum Timor Timur masuk ke wilayah Indonesia pada masa itu baru saja selesai perang Vietnam kemudian, bersamaan dengan itu, partai sosialis itu memenangkan pemilu di Portugis karena Partai Sosialis memenangkan Pemilu di Portugis ada kekhawatiran Amerika dan Australia Timor Leste ini dijadikan pangkalan militer oleh Rusia pada masa itu akibatnya apa, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu dengan Australia pernah datang ke Jakarta, menghubungi Soeharto, waktu itu Presiden jadi sebenarnya yang mengiming-iming kita untuk masuk ke Timor Leste itu sebenarnya Australi dengan Amerika serikat sendiri walaupun kemudian itu tidak, kemudian perkiraan mereka tidak terbukti sekarang ini Pak ada pergeseran pasukan marinir di dekat Darwin sebanyak 2.000 jangan kita lupa bahwa di kawasan Timur Indonesia ada beberapa perusahaan besar milik Amerika Pak Newmount Freport kemudian dilekukan kepala burung itu sekarang ada gas yang besar yang juga sedang digarap oleh Amerikalagi pulau Maluku, Maluku Selatan paling Selatan berbatasan dengan dekat dengan Australia itu juga ada gas dan sekarang dibangun pangkalan, pangkalan Angkatan Laut kita dan lapangan terbang yang ingin saya tanyakan Pak apakah mungkin kalau kita tidak segera merealisasi timor Leste ini, Timor Leste ini diikat dalam perjanjian kerja sama pertahanan apa mungkin Timor Leste ini jadi pangkalan militer asing, apalagi kondisi ekonominya lagi tidak bagus kalau dia ditawarkan sewa untuk dijadikan pangkalan asing, saya kira itu akan menarik buat dia menurut perkiraan Pak Kusnanto kemungkinan-kemungkinan Amerika yang sekarang menggeser ke Darwin, ada 2.000 marinir di sana itu bisa saja dia geser kemudian ke Timor Leste dan itu menjadi ancaman nyata buat kita saya kira itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Walaupun 2 pertanyaan Pak Kusnanto, kelihatannya pertanyaannya memang cukup berat ya mengenai tadi dari Pak Sukamta mungkin kita perlu adanya perangkat untuk memperkuat hubungan ini, sehingga dia tidak *membikin* fakta pakta macam-macam dengan negara-negara lain. Saya rasa ini penting ini, karena ada koneksitas atau hubungan dengan apa yang disampaikan Pak Salim Mengga itu benar sekali Pak. Dulu *iming-iming* masuk ke sana itu memang mereka-mereka itu, tapi kelihatannya suruh kita pergi lagi dia juga kalau nggak salah itu nah kita ini yang dimainkan kelihatannya, dia ...nyuruh nanti ngeluarkan kita dia lagi dengan *macem-macem* kan ini, agak aneh memang ada dulu dari segi pertahanan ya, kita mendapat informasi bahwa orang-orang ya tanda kutip ya, orang-orang pihak sana *pingin* membuat satu pangkalan besar di belahan dunia bagian Selatan tadinya katanya di Australia, tapi karena dia penduduk Australia mungkin kurang setuju dengan dampak ini, dampak ini, akhirnya beralih-beralih. Jadi apa yang disampaikan Pak Salim Mengga tadi mungkin ada konteks yang di sana Pak Kusnanto, mohon Pak, mungkin adalah pandangan dari Bapak. Nah, sehingga kita memang meratifikasi ini Undang-Undang ini sudah tidak ragu-ragu nanti, kalau kita ratifikasi terus dia *bikin* pakta dengan yang lain, apa perlu kita tulis ini waria, setelah ini nggak boleh *bikin* pakta lagi. Nah, ini Undang-Undang Internasional kita juga belum mendalami masalah itu Pak, *monggo* Pak Kusnanto.

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Ya, terima kasih.

Kemungkinan Timor Timur menjadi pangkalan asing, asing lain, entah pergeseran 2.500 marinir dari Darwin ke Dili dan sebagainya pasti ada menurut saya pasti ada, dan itu akan secara langsung terkait dengan beberapa hal, misalnya saja jangan lupa bahwa di sekitar Timor Timur itu termasuk salah satu dari Alur Laut Kepulauan Indonesia, kita punya 4 di Selat Malaka, di Selat Sunda, Lombok, terus kemudian Arafuru dan seterusnya itu termasuk satu yang paling penting, Australia pasti mempunyai kepentingan yang sangat besar karena 55% dari ekspor batubara ke Cina melalui kawasan itu. Jadi saya kira kemungkinan Timor Timur untuk menjadi pangkalan asing itu besar tapi bisakah kemungkinan itu kita cegah dengan persetujuan, ini jawabannya tidak jadi nggak ada hubungannya karena di dalam persetujuan yang kita punya dengan Timor Timur, itu yang diatur justru misalnya adalah tentang bagaimana pengakhiran hubungan

bagaimana kalau terjadi silang selisih antara kedua belah pihak, antara Indonesia dan Timor Leste, dan jadi nggak ada hubungan, jadi pertanyaannya memang sebenarnya punya kah kita kebijakan yang konkret mengenai bagaimana orientasi strategi taktik operasionalisasinya tentang Timor Leste, jawabannya *nggak* ada Pak Salim, jawabannya nggak ada dan saya khawatir misalnya kalau pemerintahan sekarang ini sampai Tahun 2019 tidak cukup memberikan prioritas dan orientasi pada negara-negara semacam Timor Leste, apalagi kalau instingnya yang kita lihat dalam satu bulan terakhir adalah insting ekonomi, ini itu dan seterusnya kemungkinan pertimbangan-pertimbangan psikologi dan politik untuk bisa menjaga supaya Timor Leste berada di dalam dan sebaliknya akan menjadi semakin jauh. Jadi saya kira tadi Pak Pak Salim atau Pak Gamari ya tadi ya yang mengatakan bahwa untuk memanggil katakanlah Menteri Pertahanan atau Panglima itu menjadi penting untuk menanyakan misalnya 6 kasus Timor bisnisnya tidak yakin kalau jaraknya positif mengenai artikel itu Persijap yang lain-lain dan lain-lain itu misalnya data 3 apa, tentara Pakistan yang ada di Sesko TNI dan seterusnya yang jawabannya pasti positif kalau pertanyaannya itu, ada atau tidak pertanyaan yang pertemuan antara Indonesia dan Pakistan yang membahas mengenai masalah-masalah strategis kedua belah pihak, jawabannya pasti ada tapi kalau jawabannya adalah ini apa, yang terakhir pernah dikembangkan sesuai dengan konteks politik dan sebagainya ini menjadi penting. Nah, ini lalu menjadi, menimbulkan persoalan lain, persoalan lain adalah persoalan tentang bagaimana Komisi I khususnya atau Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya, melakukan kontrol politik pada penyelenggaraan pemerintahan di bidang tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada pertahanan negara, ini yang kemudian perlu ekspertis, perlu detail, perlu pertanyaan-pertanyaan yang agak kreatif dan imajinatif dan sebagainya dan bisa saja kalau Komisi I menanyakan, bagaimana antisipasi Indonesia tentang katakanlah pangkalan yang ada di Darwin sampai sekarang setahu saya *nggak* ada itu Pak Salim Mengga, kecuali program untuk misalnya adalah menambah satu Divisi Kostrad, tapi itu tempatnya ada di Sorong. Jadi memang itu penting dalam konteks....

(....):

Saya minta maaf ini, yang di Darwin itu Amerika Pak.

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Yang di Darwin itu Amerika bukan Timor Leste, maka pertanyaan saya, pertanyaannya, seberapa jauh ada kemungkinan untuk memindahkan pangkalan dan seterusnya, jawaban saya ada dan sebagainya dan sebagainya, kan begitu ya. Lalu itu tidak mungkin bisa dicegah atau dengan persetujuan yang kita miliki, misalnya andaikan kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Timor Timor pun, dengan Timor Leste pun pangkalan itu ya tetap akan ada di sana. Jadi persoalannya menjadi persoalan lain, apa, antisipasi kita terhadap misalnya kehadiran militer Amerika di Darwin. Karena bisa dipastikan betul sekali kalau di situ ada Newmont, terus kemudian di Papua ada banyak sekali dan mungkin *instability* di Papua itu akan dijawab dengan katakan sebagian di antaranya dengan penempatan Pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin ya bisa saja, kan begitu. Kita tidak mungkin mencegah hal itu salah satu antisipasi yang paling masuk akal kan cuma memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia. Dan itukan hanya terjadi pada Tahun 2019 saya kira ketika kita melihat pada *essential forces*-nya program TNI, dengan penambahan satu divisi Kostrad yang ada di Sorong. Jadi kita direncanakan akan punya 3 divisi, yang lain lagi adalah kemungkinan untuk metamorfosis atau transformasi dari 2 armada menjadi 3 armada, misalnya begitu. Tapi Kalau pertanyaannya adalah apakah Indonesia cukup mempunyai kemampuan responsif dan antisipatif yang efektif untuk bisa menghadapi, misalnya intrusi, agres, atau *accidental conflict* dengan pasukan, pasukan Australia katakanlah, skenario paling buruk saya kira kita akan baru mempunyai kemampuan itu pada Tahun 2029. Jadi kalau memang ini menjadi kekhawatiran kita Bersama, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, maka yang harus ditanyakan Komisi I DPR RI adalah apakah ada perubahan orientasi katakanlah dalam pembangunan pertahanan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Yang harus ditanyakan kepada Bapak Menhan kita sekarang misalnya bukan tentang persetujuan ini misalnya tetapi tentang apakah akan ada ini itu dan seterusnya. Sejauh menyangkut poros maritim ini yang tidak pernah ditanyakan dan sebenarnya bisa dikembangkan dari kesepakatan antara Indonesia dan Timor Leste kalau melihat lagi-lagi butir terakhir yang sering saya sebut tadi adalah jangan lupa

bahwa kalau Tahun 2019 paling lambat itu hanya akan berjalan kurang lebih saya punya gambar ya, sekitar 20-an kilo meter di sebelah utara Timor Leste. Jadi berangkatnya lewat sana dan seterusnya sampai kemudian Merauke-Sorong, kembalinya ke sebelah barat melalui beberapa jalur, dan akan kembali melewati beberapa kilo meter dari daerah Timor Leste, dan itu pasti akan memotong alur laut Kepulauan Indonesia yang lewat Arafuru dan Pulau Aru dan ini menjadi relevan untuk ditanyakan kepada Menhan dan Panglima TNI, misalnya tentang apa yang dilakukan Indonesia. Kalau ini sekali lagi penting, ini saya kira nanti ada Pak Salim Mengga, kemudian Pak Gamari, kemudian ada Mas Djoko, Pak Alimin, Pak Sukamta untuk ditanyakan, tapi itu tadi, ini tidak ada hubungannya dengan yang kita sepakati sekarang, tidak ada hubungannya dengan Persetujuan antara Indonesia dan Timor-Timor dan dengan isu tentang ratifikasi. Tapi kita memang mempunyai masalah besar di bagian timur dan Timor Leste akan menjadi bagian yang sangat penting dalam politik luar negeri maupun pertahanan Indonesia, yang perlu dipastikan adalah agar kita mempunyai *specific policy* kalau perlu, kebijakan yang khusus, apakah kemudian ratifikasi merupakan bagian dari kebijakan khusus itu saya tidak yakin terus terang. Tapi bahwa kita perlu punya kebijakan khusus tentang Timor Leste jawabannya adalah iya, dan bahwa Timor Leste sekarang bahwa Indonesia mempunyai *window of opportunity* untuk bisa menjadi *big brothers* dan untuk bisa diterima oleh Timor Leste sekarang ini jawabannya adalah iya, dan saya kira saya masih condong bahwa seandainya Timor Leste dijatuhkan pada pilihan antara Tiongkok atau Indonesia menurut konfigurasi elite politik di Timor Leste sekarang yang usianya kurang lebih 55 tahun ke bawah, jawaban mereka akan lebih menyukai Indonesia, dugaan saya. Kalau tidak mau Indonesia gabung Timor-Timor.

KETUA RAPAT:

Mungkin ada lagi ini Pak Kus, apa namanya, untuk masalah pangkalan ini kita khawatir dan juga tidak etis kalau disebutkan dalam draft ini, memang di sini ada klausul yang menyebutkan Pasal 2, bahwa bekerja sama di bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh kedua pihak, apakah di sini kita *bikin* semacam turunnya nanti kerja sama atau latihan bersama antara TNI dengan sana, kemudian juga dengan Menhan, karena kita tulis "kamu tidak boleh *bikin...*", kan tidak mungkin di sini, tapi ada klausul lain yang menyebutkan kerja sama di bidang-bidang lain yang disepakati, mungkin bisa kita *bikin* turunan. Masalah tadi gelar pasukan TNI, memang dari dulu ini sudah lama kita bicarakan, karena pincang kita biasanya menganut di TNI sistem segitiga kayak Amerika. Jadi kalau ada 2 menyerbu satu cadangan, kita lihat sekarang gelar kita sekarang seperti itu. Angkatan Darat hanya punya 2 Divisi Kostrad di Indonesia Barat dan Tengah, di Timur belum, memang ada rencana untuk pengembangan jadi 3, termasuk juga jangan hanya Almabar, Armatim, Armatank-nya tidak ada, jadi memang ini perlu juga, tapi ini disesuaikan dengan dana yang ada, kemudian perkembangan politik kita dengan internasional, karena mau tidak mau kita harus menjadi ALKI. Ya, memang mau tidak mau ini ALKI ini harus kita jaga, karena memang perjanjian internasional kita harus memberikan jalur masuk untuk negara-negara lain di negara kita ini. Jadi ini mungkin perlu kita dapat masukan dari Pak Kusnanto apakah memang ini perlu bisa diberi turunannya untuk mencegah ini atau cukup kita tanya sama Menhan dan Panglima TNI bagaimana ini kemungkinan kerja sama ini memang kita tidak menuduh ya, tapi negara-negara tertentu ingin sekali untuk membuat kontribusi yang sangat besar di sana untuk kepentingan mereka. Jadi kita juga jaga-jaga mulai sekarang. Jadi saya setuju Pak Kusnanto tadi, lebih baik kita rangkul daripada dirangkul orang lain. Kita belum melihat masalah sumber daya alam dan lain-lain, memang di sana memang masih ada seperti BBM dan lain-lain, waktu saya operasi Pak Rizal di sektor timur dekat bukit ada kolam yang orang-orang kampung itu ngambil menyendok seperti minyak itu untuk bahan bakar di rumahnya, mungkin minyak mentah atau apa saya juga tidak tahu itu, malah kita juga ngambil pakai helm ramai-ramai itu. Masak nasi di hutan ada itu orang-orang kampung, ini Pak Kus mungkin apa ini perlu kita kaji mungkin ya, bagaimana ini apa cukup dengan pertanyaan kepada Panglima TNI dan Menhan, tetapi tidak kita sebutkan masalah *draft* Rancangan Undang-Undang ini.

Silakan Pak.

PAKAR (KUSNANTO ANGGORO):

Saya kira memang klausul itu, katakanlah bahwa kerja sama yang disepakati kedua belah pihak dan seterusnya tidak cukup berkembang. Saya tidak yakin kalau seandainya Timor-Timor menerima misalnya tawaran Amerika Serikat atau Australia untuk ditempatkan sebagai pangkalan militer, saya kira Indonesia tidak terlalu bisa protes. Pada umumnya di dalam perjanjian-perjanjian internasional, kerja sama baru termasuk penempatan pangkalan, itu memang ada klausul yang mengatakan bahwa perjanjian ini berlaku dan disepakati dan seterusnya selama tidak mengganggu hubungan bilateral antara negara-negara tertentu, tapi pihak ketiga dalam hal misalnya pangkalan di Timor Leste dengan Australia, Indonesia tidak bisa protes. Maka menurut saya satu-satunya cara bagi Indonesia untuk bukan satu-satunya, ada banyak cara 3 cara paling tidak satu adalah menjalin hubungan yang lebih baik, sehingga Timor Leste merasa lebih aman dan nyaman bersama *big brothers*-nya. Kedua adalah dengan misalnya tentu dengan *defence modernization*, katakanlah meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, kita tahu bahwa kita baru mencapai kebutuhan minimum paling cepat Tahun 2019, dan untuk bisa mencapai kemampuan standar dalam hal ini bisa mengimbangi Australia di sebelah selatan, dan sebelah utara dengan negara-negara ASEAN yang lain, itu paling cepat Tahun 2029. Kalau Komisi I DPR RI atau Dewan Perwakilan ingin cair, cair adalah istilah yang buruk, tapi maksud saya bagus untuk mempercepat atau mengubah konstilasi itu menanyakan kepada Pemerintah, ada atau tidak perubahan orientasi tentang modernisasi pertahanan Indonesia, supaya tujuan objektif untuk mempunyai kemampuan antisipatorik itu bisa lebih cepat dari yang direncanakan, inikan pertanyaan jaii tapi positif. Jawaban saya, saya tidak yakin kalau Panglima TNI maupun Menhan bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi itu alternatif kedua, alternatif ketiga untuk responnya tentu saja dengan misalnya adalah dengan tindakan-tindakan dalam tanda petik adalah *extraordinary*. Selalu ada menjawab menurut saya untuk supaya bagaimana katakanlah menjinakan atau meminimalkan *risk* kalau seandainya suatu saat Timor Timor menjadi pangkalan asing, tapi pertanyaannya besarnya tetap, yaitu bahwa yang harus kita perdebatkan, kita persoalkan dan Komisi I DPR RI harus pertanyakan kepada Pemerintah adalah rincian mengenai orientasi strategis dan taktik mengenai apa yang dilakukan dalam konteks hubungan Indonesia dengan Timor-Timor, bagaimana mengantisipasi kalau terjadi perkembangan hubungan antara Timor-Timor dengan Tiongkok atau dengan Australia, atau dengan Amerika Serikat. Bagaimana misalnya adalah rincian mengenai pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia untuk melindungi ALKI di sebelah Timur Indonesia karena juga merupakan sesuatu yang sangat bolong saya kira, karena sebagian penguatan yang terjadi ada di ALKI di sebelah barat fokusnya ada di setelah sekitar Selat Malaka, di sebelah Timur tidak ada, tidak ada sama sekali pengembangan itu. Saya hanya bisa menjawab sejauh itu Pak Asril, sejauh menyangkut bagaimana kita harus merespon, sekali lagi tidak ada di maksud saya tidak terlalu berhubungan dengan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Timor Leste. Jadi sekalipun ada persetujuan itu, sekalipun Dewan Perwakilan Rakyat nanti akan meratifikasi persetujuan itu, semuanya tidak menutup kemungkinan bagi Timor Leste untuk tetap menjadi pangkalan asing suatu saat. Jadi pertanyaan kita tetap lagi-lagi bagaimana kalau katakanlah ada Pangkalan Asing di Timor-Timor itu terjadi, apa langkah antisipatorik yang harus dilakukan. Kalau itu persoalan besar yang kita miliki saya kira ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Kusnanto, Rekan-rekan sekalian,

Kelihatannya ini kita waktunya tepat sesuai rencana, tapi kalau mungkin masih ada silakan *monggo* atau perlu diselesaikan secara adat di luar nanti juga bisa, tapi ada Anggota baru datang lagi ini Pak Kusnanto ini yang paling cantik di tempat kita ini, yang ingin ke Timor Leste dulu waktu saya ke sana beliau masih kecil jadi susah dibawa, kalau sekarang sudah besar, mungkin sudah ingin ada pertanyaan silakan Ibu Rachel Maryam kita kenalkan silakan. Satu lagi *monggo* kalau memang ada, Mas Budi sama Ibu Rachel silakan yang ditanyakan masalah Timtim kalau Pakistan sudah kita tutup bukunya, tapi Timtim masih ada. Karena Bapak-Bapak ini seperti Bapak Asril, Pak Salim kalau nostalgia di Timtim itu sudah luar biasa ya. Ada yang tentara kita yang dapat putri di sana, juga ada jodohnya. Jadi ini menarik ini kalau misalnya beliau artis

mana tahu mau *bikin* film di Timor ini kita dukung ramai-ramai ini bagus sekali, ini untuk mencegah yang tadi itu, biar tidak jadi pangkalan asing kita bombardir saja dengan masalah budaya dan lain-lain.

Silakan kalau ada, Ibu Rachel? Pak Rudi? *Monggo* tidak ada juga. Pas ya? Jadi terima kasih Bapak Kunanto Anggoro, rekan-rekan sekalian memang Rapat Dengar Pendapat kita hari ini ini kita merupakan mau mendapatkan masukan saja dari para Tim Pakar. Kita *alhamdulillah* sudah dapat pencerahan mungkin hal-hal informasi baru juga dari Pak Kusnanto, kami sangat berterima kasih atas nama DPR RI, mungkin tidak sekali ini Pak, suatu saat kita mungkin juga butuh lagi tandatangan atau kita adu bako di sini istilahnya tolong Pak Kusnanto masih mau untuk meluangkan waktunya kepada kita sekalian. Masukan-masukan berharga ini akan kami buat nanti untuk pengkajian lebih lanjut masalah untuk Ratifikasi Perjanjian dengan Timor ini, untuk Pakistan kita juga sudah tadi membahasnya Timor-Timor juga memang semua negara sahabat memang kita perlu mungkin membuat perjanjian-perjanjian kerja sama, apakah itu di bidang ekonomi, apalagi di bidang pertahanan, karena ujung-ujungnya nanti ada masalah apalagi yang berbatasan. Jadi kalau tidak ada, *alhamdulillah* kita akan segera menutup ini. Rekan-rekan sekalian Anggota Komisi I DPR RI, Pak Kusnanto, dengan *alhamdulillah* pertemuan kita sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan *Insy Allah* akan bermanfaat kita semua selesai ini mungkin di undang makan siang bersama Pak Kusnanto kalau tidak puasa ya.

Kalau tidak ada ini saja, terima kasih sekali lagi Pak Kusnanto.

Kita tutup sidang ini dengan mengucapkan *alhamdulillah*.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.42 WIB)

Jakarta, 19 November 2014
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P.
NIP. 19710106 199003 2 001